

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2022

*PEMERATAAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2022

*PEMERATAAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*

<https://kaltim.bps.go.id>



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2021

ISSN : 1907-2104
No. Publikasi : 64000.2228
Katalog : 4102004.64

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 94 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
Gambar Kover oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Dicetak oleh:

CV. Suvi Sejahtera

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2022

Pengarah:

Dr. Yusniar Juliana, SST, MDEC

Penanggung Jawab:

Nurul Istiqomah, SST, M.Si.

Editor:

Ika Ayuningtyas, S.ST, M.Si.

Penulis:

Muhammad Suryanata, S.Si.

Pengolah Data:

Muhammad Suryanata, S.Si.

Desain/Tata Letak:

Muhammad Suryanata, S.Si.

Kata Pengantar

Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2022** ini merupakan kelanjutan penerbitan sebelumnya yang disusun setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Potensi Desa (Podes), Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk 2015-2045 dengan maksud untuk memberikan gambaran umum mengenai keadaan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut aspek Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pola Konsumsi, serta Perumahan. Di samping indikator kesejahteraan rakyat yang rutin disajikan, mulai tahun 2020 dilakukan penambahan satu topik khusus. Topik publikasi Inkesra Provinsi Kalimantan Timur tahun ini mengambil tema “Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur”.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Samarinda, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur



Yusniar Juliana

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I Pendahuluan	1
Latar Belakang	3
Tujuan	4
Ruang Lingkup.....	4
Jenis, Serta Sumber Data dan Informasi.....	4
BAB II Capaian Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.....	5
Peran Pendidikan dalam Pembangunan.....	7
Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah	9
Partisipasi dalam Pendidikan.....	11
Angka Putus Sekolah.....	14
BAB III Pemerataan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur	17
Daya Serap dan Kapasitas Sistem Pendidikan	19
Akses Fasilitas Pendidikan	22
Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi	26
Perkotaan dan Perdesaan.....	27
BAB IV Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur	31
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tenaga Kerja.....	33
Pengangguran Terdidik.....	35
Kesimpulan	36

5. BAB V Perkembangan Kesejahteraan Rakyat.....	39
Kependudukan	41
Kesehatan.....	49
Pendidikan.....	55
Ketenagakerjaan	60
Pola Konsumsi	68
Kemiskinan	70
Perumahan	73
Daftar Pustaka	82
Lampiran	87

<https://kaltim.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	24
Tabel 3.2	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Persen), 2021 ...	25
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Rasio Jenis Kelamin per Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	41
Tabel 5.2	Luas Daerah (Km ²) dan Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	43
Tabel 5.3	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2021.....	44
Tabel 5.4	Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021.....	45
Tabel 5.5	Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2021	45
Tabel 5.6	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Partisipasi KB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2021	48
Tabel 5.7	Persentase Penduduk yang Pergi Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2020	53
Tabel 5.8	Persentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah dan Masih Diberi ASI menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2021.....	55

Tabel 5.9	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2021.....	58
Tabel 5.10	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7-18 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021	59
Tabel 5.11	Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021	60
Tabel 5.12	Persentase Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	62
Tabel 5.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	63
Tabel 5.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	63
Tabel 5.15	Persentase Penduduk 15+ Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2020-2022	65
Tabel 5.16	Persentase Penduduk 15+ Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	66
Tabel 5.17	Persentase Status Penduduk 15+ Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seminggu di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2021	67
Tabel 5.18	Persentase Pengeluaran Penduduk per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2021	69
Tabel 5.19	Persentase Pengeluaran Penduduk per Kapita Kelompok Bukan Makanan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2021	69
Tabel 5.20	Garis Kemiskinan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2022 (Rupiah)	70

Tabel 5.21	Koefisien Gini, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	72
Tabel 5.22	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021	74
Tabel 5.23	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2020	76
Tabel 5.24	Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021.....	79

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2020 dan 2021	10
Gambar 2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2020 dan 2021	11
Gambar 2.3 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021.....	12
Gambar 2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021.....	14
Gambar 2.5 Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021.....	15
Gambar 3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021	20
Gambar 3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021	21
Gambar 3.3 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	23
Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021	28
Gambar 3.5 Angka Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021.....	29
Gambar 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021-2022.....	34

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2022	35
Gambar 5.1 Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	42
Gambar 5.2 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Partisipasi KB di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	46
Gambar 5.3 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Cara KB yang Digunakan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	47
Gambar 5.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2021	50
Gambar 5.5 Persentase Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Pergi Berobat Jalan di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2021	52
Gambar 5.6 Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2021	54
Gambar 5.7 Persentase Penduduk Berumur 15+ Tahun yang Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2021.....	57
Gambar 5.8 Diagram Ketenagakerjaan	61
Gambar 5.9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2017-2022.....	71

Gambar 5.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021	77
Gambar 5.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung dan Mata Air Tak Terlindung menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021	78

<https://kaltim.bps.go.id>

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	89
Lampiran 2	Komponen Penyusun IPM Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	90
Lampiran 3	Komponen Penyusun IPM Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	91
Lampiran 4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	92
Lampiran 5	Komponen Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021	93
Lampiran 6	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2021	94

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I Pendahuluan

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Dalam konteks Kalimantan Timur, peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan visi dan misi Kalimantan Timur, terutama misi pertama yaitu mewujudkan kualitas SDM Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Peningkatan kualitas SDM Kalimantan Timur dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan, seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Capaian Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diukur secara berkala. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan apakah program-program pembangunan tersebut masih layak untuk dilaksanakan, atau apakah program tersebut masih perlu dioptimalkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk dapat melihat sampai sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pada hakikatnya, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk. Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan. Pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa. ini. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Di samping

itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan ke-4 SDGs, yaitu “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua.”

Tujuan

Tujuan secara umum pembuatan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Timur 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu untuk menganalisis dan menyajikan seputar pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang turut mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur melalui data. Dengan tersedianya publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan terkait pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.

Ruang Lingkup

Analisis tematik pendidikan ini menyajikan data dan informasi hingga tahun 2022. Penyajian data dan informasi serta analisis dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kondisi kesejahteraan pada tingkat provinsi. Beberapa informasi juga disajikan secara disagregasi hingga tingkat kabupaten/kota untuk memberikan gambaran lebih khusus pada wilayah yang lebih kecil.

Jenis, Serta Sumber Data dan Informasi

Untuk mendukung analisis tematik pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur ini digunakan data dari berbagai sumber. Data dari BPS menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Potensi Desa (Podes), Sensus Penduduk 2020 (SP2020), dan Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur.

BAB II CAPAIAN PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



BAB II Capaian Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur

Peran Pendidikan dalam Pembangunan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya, sebab pendidikan itu sendiri tidak akan ada habisnya. Secara umum, pendidikan mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Peranan pendidikan sangat besar dalam mempersiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan mampu bersaing secara sehat, serta meningkatnya rasa kebersamaan dengan sesama manusia (Alpian dkk, 2019).

Pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa. Definisi umum pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik

Dalam pembangunan berkelanjutan, yang menjadi salah satu faktor utama dan terpenting yaitu pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu dari 17 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Khususnya pada target 4.1, terdapat komitmen untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian

kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang andal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Kualitas SDM dalam periode ini terwujud dalam kemandirian masyarakat yang telah mencapai tingkat mapan, dan berdaya saing tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut terdiri dari beberapa prioritas, antara lain:

- a. Pelaksanaan pendidikan 12 tahun dan pendidikan tinggi dengan mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah berbasis kejuruan di seluruh wilayah bertujuan mewujudkan kualitas pendidikan umum di atas rata-rata nasional dan pendidikan bertaraf internasional;
- b. Pengembangan litbang dan iptek agar terwujudnya pemanfaatan jasa dan produk tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan publik pada lembaga pemerintah dan swasta;
- c. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan yang terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah ditandai dengan semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai di atas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan kecil, wabah semakin dini dapat di atasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik;

- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja masyarakat setempat baik dalam pengetahuan maupun keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan ditandai menurunnya angka pengangguran dan peningkatan produktivitas kerja;
- e. Peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan dan kesetaraan gender ditandai peningkatan peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan masyarakat;
- f. Pengembangan peran pemuda dalam bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga terwujud dengan semakin banyaknya organisasi kepemudaan bukan hanya tingkat kabupaten/kota melainkan sampai tingkat kecamatan dan desa;
- g. Peningkatan prestasi bidang olahraga unggulan ditandai dengan peningkatan peringkat dalam skala nasional, semakin banyaknya pertandingan dan ekshibisi dan bertambahnya organisasi kepemudaan berbasis olahraga;
- h. Peningkatan kegiatan keagamaan oleh masyarakat, perkembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama serta pengembangan sekolah keagamaan yang terdistribusi ke berbagai daerah guna mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
Penyantunan berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat ditandai semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh.

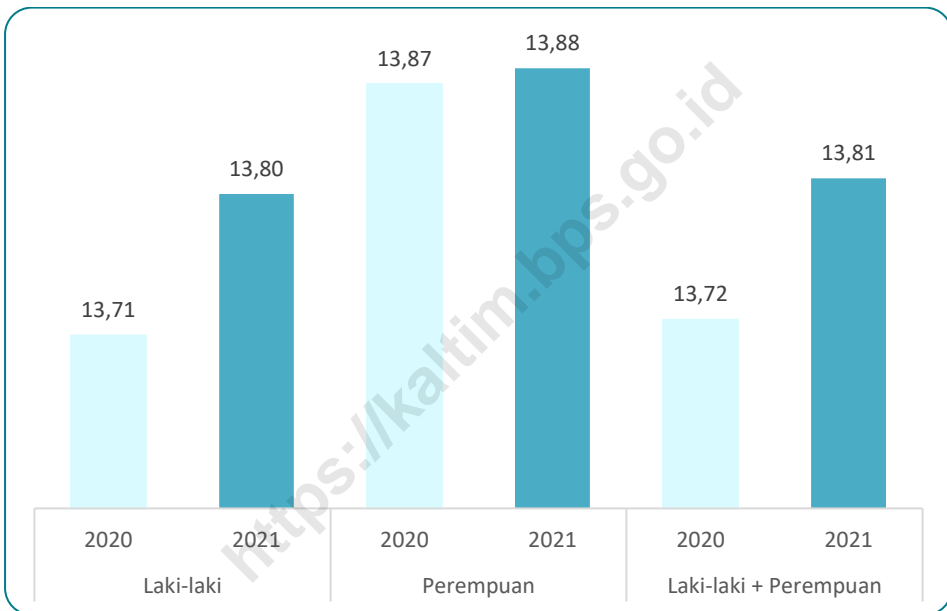
Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu wilayah. Dengan SDM yang berkualitas, perekonomian suatu wilayah pun dapat berkembang secara optimal.

Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diharapkan akan semakin cerdas, semakin kreatif dan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas.

Gambar 2.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur (Tahun), 2020 dan 2021

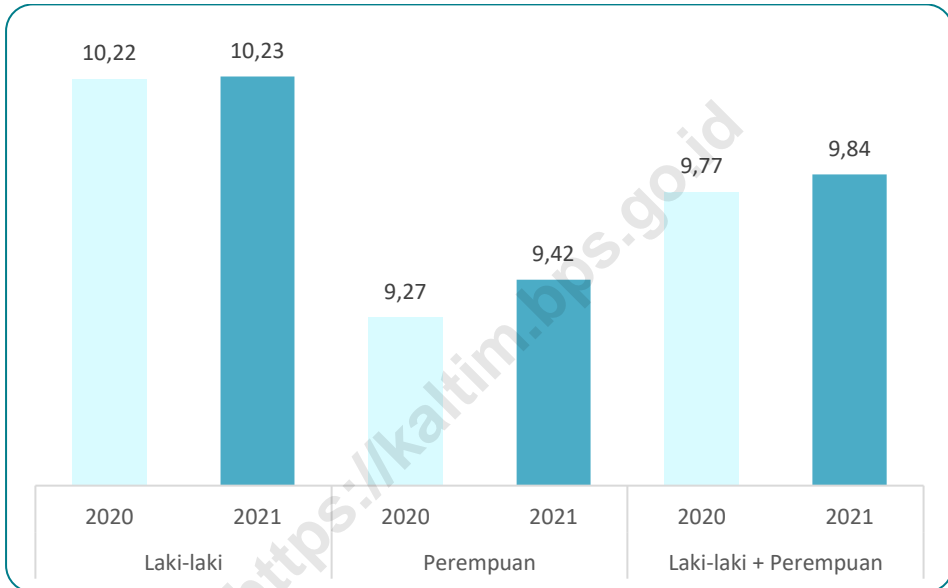


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Angka harapan lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 dan 2021 sudah cenderung sama. Tidak ada perbedaan berarti pada capaian HLS di antara dua kelompok gender tersebut. Terjadi peningkatan capaian HLS pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021, diperkirakan bahwa anak yang berumur 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan akan dapat bersekolah selama 13,80 tahun untuk anak laki-laki dan 13,88 untuk anak perempuan, atau setara dengan menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Diploma I/II).

Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk laki-laki dan perempuan pada periode yang sama. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki di Kalimantan Timur mencapai 10,23 tahun, sedangkan untuk perempuan hanya 9,42 tahun, hampir setahun lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Gambar 2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur (Tahun), 2020 dan 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Di sisi lain, melihat capaian RLS pada kedua kelompok gender tersebut yang tidak sampai 12 tahun, yang merupakan waktu yang ditempuh hingga lulus jenjang SMA, menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, baik penduduk laki-laki maupun perempuan berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur, secara rata-rata tidak mengenyam bangku pendidikan hingga lulus dari jenjang SMA/ sederajat.

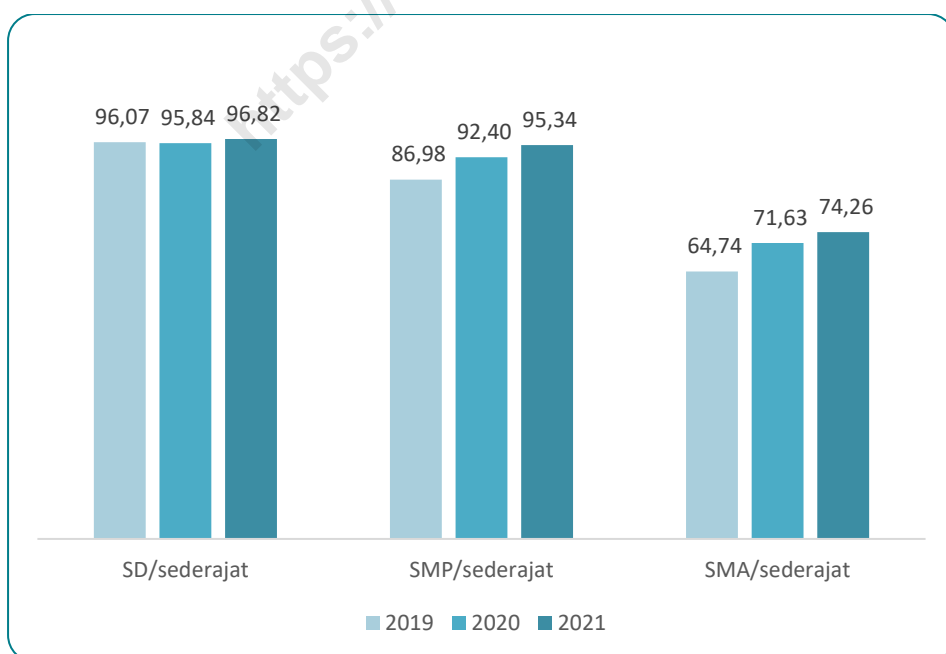
Partisipasi dalam Pendidikan

Untuk mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya, digunakan indikator Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat. Rentang usia yang termasuk dalam

perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

Indikator ini dihitung untuk memantau banyaknya anak-anak dan remaja yang dapat menyelesaikan serta melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya tanpa kendala yang menyebabkan penundaan untuk waktu yang lama. Apabila Tingkat Penyelesaian Pendidikan rendah, maka hal ini dapat mengindikasikan tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, rendahnya angka partisipasi, atau kombinasi di antaranya.

Gambar 2.3 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

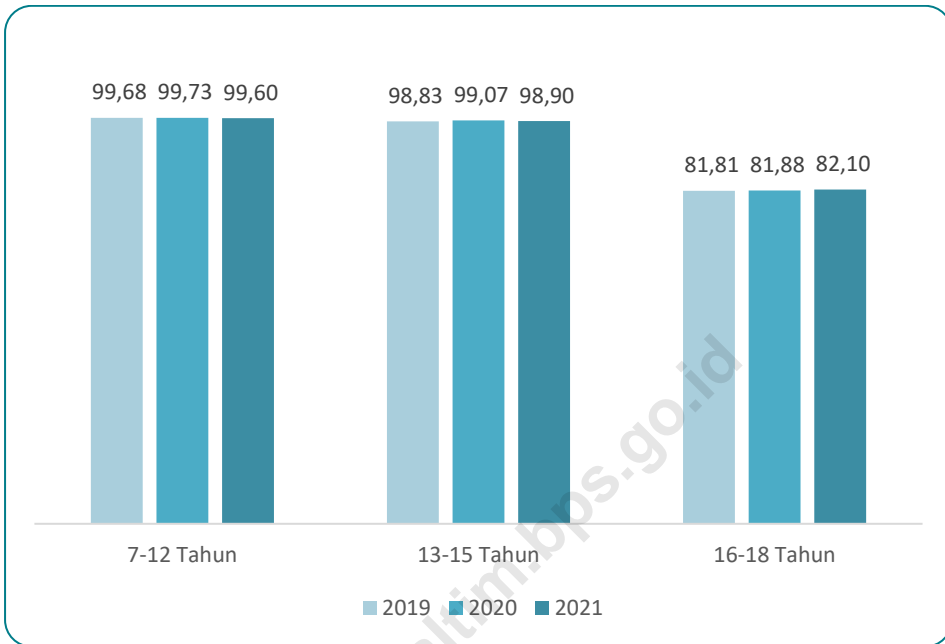
Tingkat penyelesaian pendidikan di Kalimantan Timur pada periode 2019-2021 di semua jenjang cenderung mengalami peningkatan. Penurunan sempat terjadi pada capaian penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat di tahun 2020 (95,84 persen), namun kembali meningkat di tahun 2021 (96,82 persen), bahkan capaiannya lebih tinggi dibanding tahun 2019 (96,07 persen). Secara umum, tingkat penyelesaian pendidikan di Kalimantan Timur pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sudah di atas 95 persen. Namun di sisi lain, capaian pada jenjang SMA/ sederajat masih jauh tertinggal, tepatnya di angka 74,26 persen. Rendahnya capaian tersebut mengindikasikan masih tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, serta rendahnya angka partisipasi pada jenjang SMA/ sederajat di Kalimantan Timur.

Untuk mengetahui proporsi penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, maka digunakan indikator angka partisipasi sekolah (APS). APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk berumur tertentu serta menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Rentang usia 7-12 mewakili usia murid jenjang pendidikan SD/ sederajat, rentang usia 13-15 mewakili usia murid jenjang pendidikan SMP/ sederajat, dan 16-18 tahun mewakili rentang usia SMA/ sederajat.

Dari gambar 2.4, terlihat bahwa APS pada rentang usia 7-12 tahun di Kalimantan Timur periode 2019-2021 sudah mendekati capaian 100 persen. Hal yang sama juga terlihat pada rentang usia 13-15 tahun. Hanya saja, pada rentang usia 16-18 tahun capaiannya masih jauh di bawah 100 persen, meskipun selama periode yang sama capaiannya terus mengalami kenaikan, dari 81,81 persen di tahun 2019, naik menjadi 81,88 persen di 2020, hingga mencapai 82,10 persen di tahun 2021. Masih jauhnya capaian APS rentang usia 16-18 tahun mengindikasikan masih rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang SMA/ sederajat.

Gambar 2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021



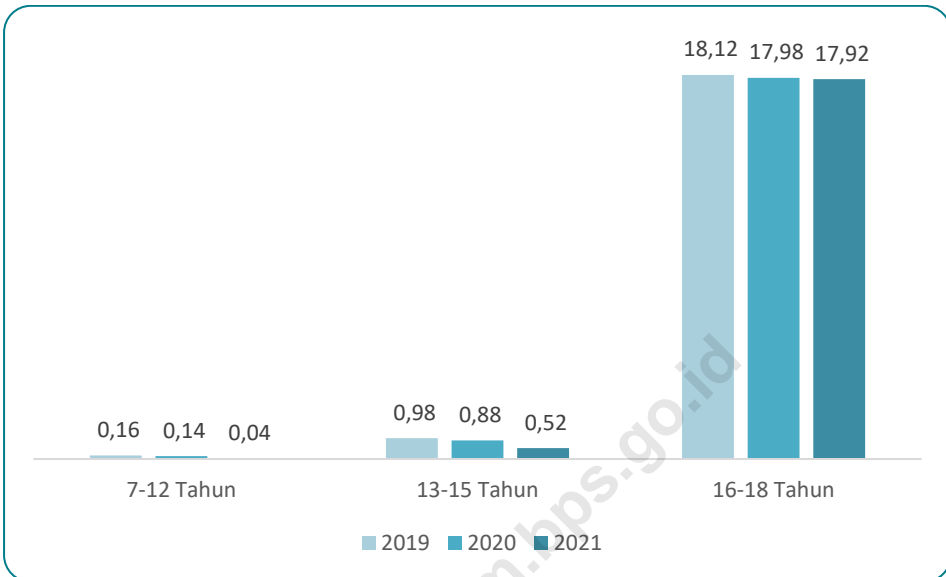
Sumber: Badan Pusat Statistik

Rendahnya capaian APS pada suatu kelompok umur biasanya erat kaitannya dengan angka putus sekolah pada kelompok umur tersebut. Angka Putus Sekolah (APTS) menunjukkan proporsi siswa pada tahun ajaran tertentu yang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat aksesibilitas pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur, serta sekaligus gambaran kemampuan ekonomi orang tua. Perkiraan jumlah putus sekolah menggunakan pendekatan kelompok penduduk berumur 7-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi termasuk penduduk yang tamat SD, SLTP dan SLTA, tapi tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena usia ini merupakan usia yang ideal untuk menyelesaikan pendidikannya.

Gambar 2.5 Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Di Kalimantan Timur sendiri, Angka Putus Sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sepanjang periode 2019-2021 sudah sangat rendah, bahkan di bawah 1 persen. Di tahun 2021, APTS masing-masing kelompok umur tersebut sebesar 0,04 persen (7-12 tahun) dan 0,52 persen (13-15 tahun). Sayangnya, kondisi demikian tidak terlihat pada kelompok umur 16-18 tahun. Meskipun cenderung mengalami penurunan, namun Angka Putus Sekolah pada kelompok umur tersebut masih terbilang tinggi, sebesar 17,92 persen di tahun 2021. Ini menunjukkan masih banyaknya penduduk kelompok umur tersebut yang tidak melanjutkan pendidikannya lagi karena berbagai alasan dan kondisi.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.

BAB III PEMERATAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



BAB III Pemerataan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Kualitas SDM dalam periode tersebut diharapkan dapat terwujud dalam kemandirian masyarakat yang telah mencapai tingkat mapan, dan berdaya saing tinggi. Salah satu prioritas upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut yaitu melalui pelaksanaan pendidikan 12 tahun dan pendidikan tinggi dengan mengembangkan sekolah unggulan dan sekolah berbasis kejuruan di seluruh wilayah bertujuan mewujudkan kualitas pendidikan umum di atas rata-rata nasional dan pendidikan bertaraf internasional.

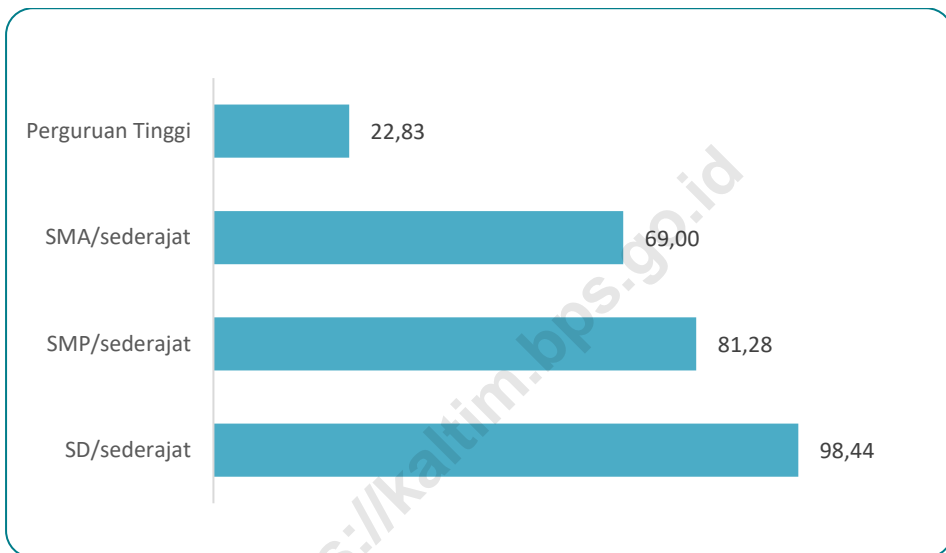
Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan (Kemendikbud, 2019).

Daya Serap dan Kapasitas Sistem Pendidikan

Sarana pendidikan sudah sepatutnya dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa tanpa pengecualian. Namun pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut belum merata ke seluruh wilayah di Indonesia, Kalimantan Timur pada khususnya. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dilakukan pengukuran melalui penghitungan Angka Partisipasi Murni (APM). APM sendiri merupakan

proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021

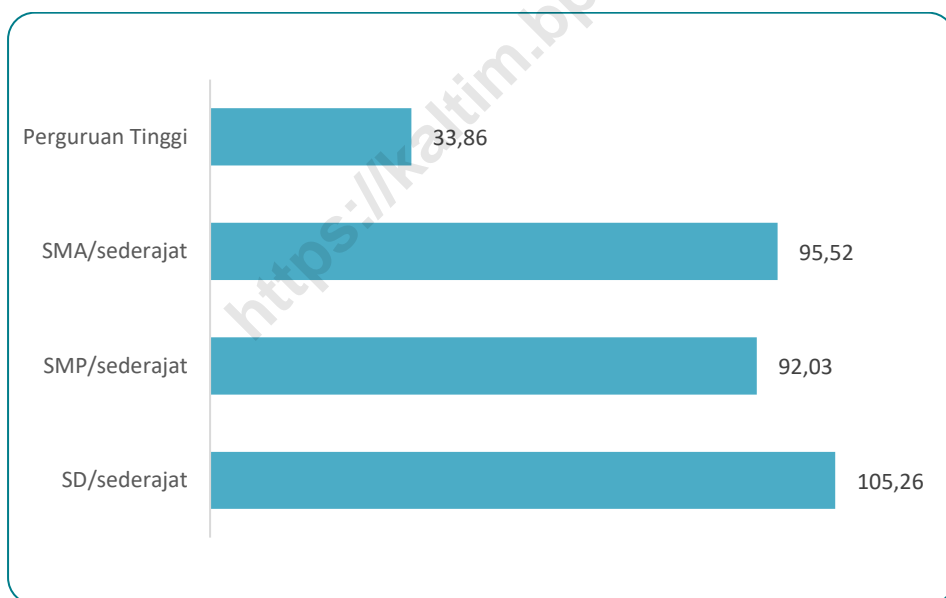


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Capaian APM tahun 2021 di Kalimantan Timur untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 98,44 persen. Artinya, ada sebanyak 98 dari 100 penduduk usia 7-12 yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan SD. Capaian APM ini semakin menurun pada jenjang-jenjang di atasnya. Pada jenjang pendidikan SMP (13-15 tahun), capaiannya sebesar 81,28 persen, dan pada jenjang pendidikan SMA (16-18 tahun), capaiannya lebih rendah lagi, sebesar 69,00 persen. Bahkan, pada jenjang Perguruan Tinggi (19-24 tahun), capaian APM-nya hanya sebesar 22,83 tinggi. Ini menunjukkan masih rendahnya daya serap sistem pendidikan pada level Perguruan Tinggi. Namun sebelum menarik kesimpulan, perlu dilihat pula besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing jenjang pendidikan.

Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu, dilakukan pengukuran melalui penghitungan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka partisipasi kasar membandingkan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK digunakan juga sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Nilai APK sendiri bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut

mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Misalnya saja pada jenjang SD, di mana capaian APK-nya melebihi 100 persen, tepatnya 105,26 persen. Capaian APK yang melebihi 100 persen tersebut mengindikasikan banyak murid SD/ sederajat yang usianya di luar rentang usia 7-12 tahun, yang bisa disebabkan karena terlalu cepat masuk SD, atau malah telat bersekolah sehingga usianya sudah lebih dari 12 tahun saat masih berada di jenjang Sekolah Dasar. Capaian APK pada jenjang SMP sebesar 92,03 persen dan pada jenjang SMA sebesar 95,52 persen. Capaian APK jenjang SMA yang lebih tinggi dibandingkan pada jenjang SMP mengindikasikan banyaknya jumlah murid SMA/ sederajat yang berada di luar rentang usia 16-18 tahun, yang mengindikasikan tingginya angka pengulangan kelas pada jenjang SMA, atau bisa juga disebabkan oleh banyaknya murid lulusan SMP yang mengambil *gap year* sehingga terlambat saat memasuki jenjang pendidikan SMA.

Capaian APK pada jenjang Perguruan Tinggi sebesar 33,86 persen. Meskipun masih terbilang rendah, namun angka ini sekitar 50 persen lebih tinggi dibandingkan capaian APM pada jenjang tersebut, yang hanya 22,83 persen. Perbedaan angka tersebut mengindikasikan bahwa ada sekitar 50 persen mahasiswa perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang usianya berada di luar rentang 19-24 tahun, bisa disebabkan oleh *gap year*, terlambat lulus kuliah, atau pun mereka yang masuk ke bangku perkuliahan pada usia di bawah 19 tahun.

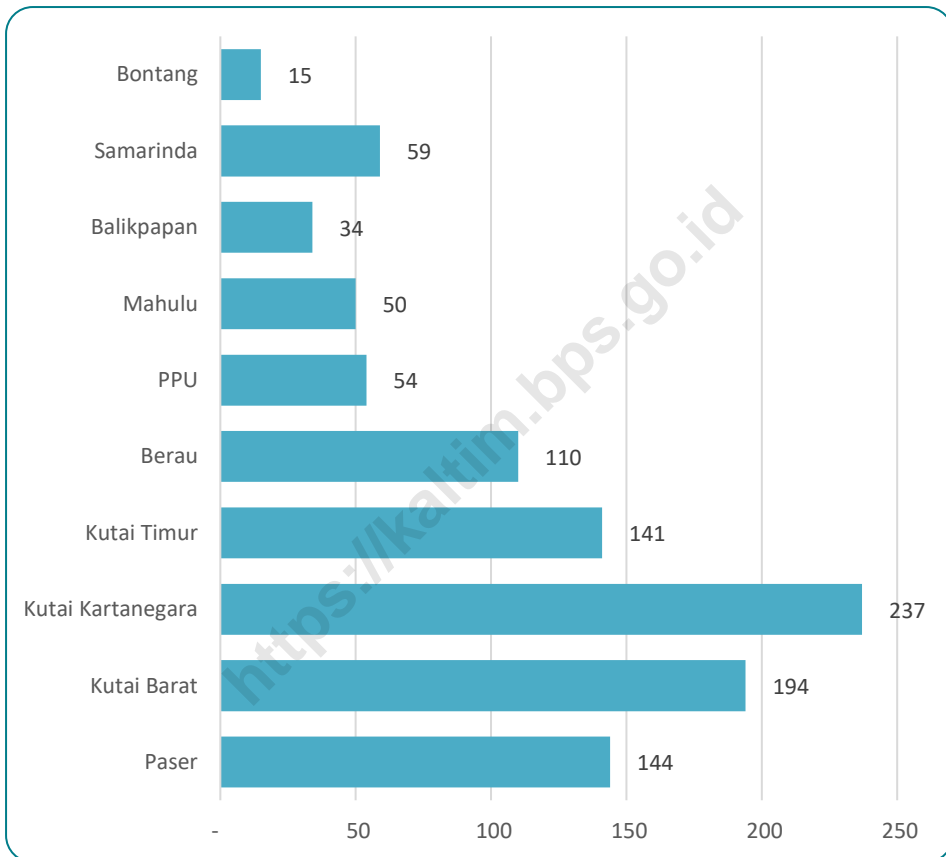
Di sisi lain, rendahnya capaian APM maupun APK pada jenjang perguruan tinggi memperlihatkan masih sedikitnya lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Selain karena alasan ekonomi, mengingat biaya kuliah yang cenderung tinggi, juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, seperti minat dari individu itu sendiri, atau ketersediaan akses ke Perguruan Tinggi di suatu wilayah.

Akses Fasilitas Pendidikan

Minat belajar tentunya juga harus ditunjang dengan memadainya fasilitas pendidikan yang terdapat pada suatu wilayah. Menurut Mulyasa (2007), sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat

penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik. Pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Gambar 3.3 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021



Sumber: Perka BPS No.3 tahun 2019 tanggal 6 Mei tentang perubahan atas Perka BPS No.90 tahun 2019 tentang kode dan nama wilayah kerja statistik tahun 2019

Secara keseluruhan, terdapat 1.038 desa/kelurahan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021. Desa/kelurahan terbanyak yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 237 desa/kelurahan dan paling sedikit di Kota Bontang yang hanya terdapat 15 desa/kelurahan saja di sana.

Tabel 3.1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	140	69	23	7	3
Kutai Barat	175	56	23	10	1
Kutai Kartanegara	229	148	62	34	4
Kutai Timur	144	76	26	18	2
Berau	107	51	20	10	4
Penajam Paser Utara	53	29	10	7	-
Mahakam Ulu	34	16	7	2	-
Balikpapan	34	32	20	20	11
Samarinda	59	49	32	30	18
Bontang	15	15	10	9	4
Kalimantan Timur	990	541	233	147	47

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa

Dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes), tidak semua desa/kelurahan di Kalimantan Timur memiliki fasilitas pendidikan (sekolah). Dari 1.038 desa/kelurahan, 990 desa/kelurahan di antaranya memiliki fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD), 541 desa/kelurahan memiliki fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 233 desa/kelurahan memiliki fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 147 desa/kelurahan memiliki fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan hanya 47 desa/kelurahan yang memiliki fasilitas Perguruan Tinggi (PT).

Secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) telah tersebar hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, dengan persentase desa/kelurahan yang memiliki fasilitas tersebut berada di atas 90 persen untuk masing-masing Kabupaten/Kota,

bahkan di ketiga kota (Balikpapan, Samarinda, Bontang) capaiannya sudah 100 persen, bahkan melebihi 100 persen untuk Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya, capaian tiap kabupaten/kota cukup beragam. Namun seperti biasa, capaian di ketiga kota di Kalimantan Timur (Balikpapan, Samarinda, Bontang) cenderung lebih tinggi dibandingkan tujuh kabupaten lainnya.

Tabel 3.2 Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Persen), 2021

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	97,22	47,92	15,97	4,86	2,08
Kutai Barat	90,21	28,87	11,86	5,15	0,52
Kutai Kartanegara	96,62	62,45	26,16	14,35	1,69
Kutai Timur	102,13	53,90	18,44	12,77	1,42
Berau	97,27	46,36	18,18	9,09	3,64
Penajam Paser Utara	98,15	53,70	18,52	12,96	-
Mahakam Ulu	68,00	32,00	14,00	4,00	-
Balikpapan	100,00	94,12	58,82	58,82	32,35
Samarinda	100,00	83,05	54,24	50,85	30,51
Bontang	100,00	100,00	66,67	60,00	26,67
Kalimantan Timur	95,38	52,12	22,45	14,16	4,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sementara itu, jenjang pendidikan Perguruan Tinggi/Universitas masih menjadi hal yang mewah bagi sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur. Hal tersebut ditunjukkan pula oleh masih minimnya desa/kelurahan di Kalimantan Timur yang memiliki fasilitas pendidikan pada jenjang tersebut, terutama di wilayah Kabupaten.

Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi

Hingga tahun 2021, terdapat sebanyak 53 Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, yang terdiri dari 5 Perguruan Tinggi Negeri dan 48 Perguruan Tinggi Swasta. Ada pun lokasi keberadaan Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur masih terpusat di wilayah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Tabel 3.3 Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	-	2	2
Kutai Barat	-	1	1
Kutai Kartanegara	-	3	3
Kutai Timur	-	2	2
Berau	-	3	3
PPU	-	-	-
Mahakam Ulu	-	-	-
Balikpapan	2	11	13
Samarinda	3	23	26
Bontang	-	3	3
Kalimantan Timur	5	48	53

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Terdapat sebanyak 26 Perguruan Tinggi yang terdiri 3 PTN dan 23 PTS di Kota Samarinda. Di Kota Balikpapan sendiri, terdapat sebanyak 13 Perguruan Tinggi yang terdiri dari 2 PTN dan 11 PTS. Sebanyak 14 Perguruan Tinggi sisanya tersebar di Kabupaten Paser (2 PTS), Kutai Barat (1 PTS), Kutai Kartanegara (3 PTS), Kutai Timur (2 PTS), Berau (3 PTS), dan Kota Bontang (3 PTS). Sementara

itu, masih tidak terdapat Perguruan Tinggi satu pun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam hal ini, pemerataan sarana dan akses pendidikan harus diperhatikan agar kesenjangan semakin kecil.

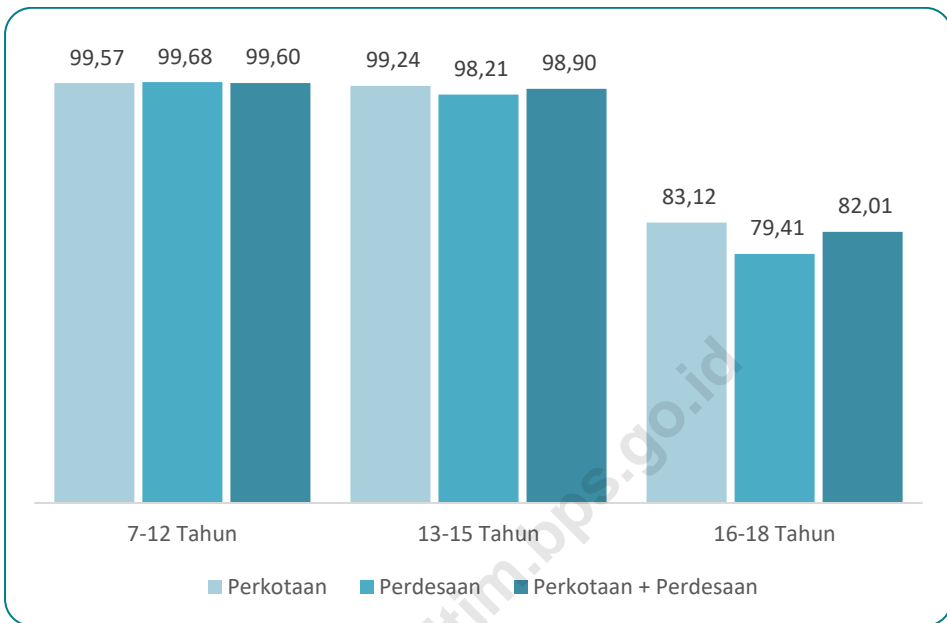
Masih terkonsentrasinya akses ke Perguruan Tinggi di kota tertentu, yaitu Balikpapan dan Samarinda, menyebabkan terbatasnya pilihan Perguruan Tinggi, atau dalam lingkup yang lebih spesifik, jurusan kuliah dan program studi yang dapat diambil oleh lulusan SMA/ sederajat di luar kedua kota tersebut yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Bahkan, untuk wilayah yang tidak memiliki Perguruan Tinggi, ini berarti mereka yang ingin melanjutkan pendidikan setelah lulus jenjang SMA mau tidak mau harus meninggalkan daerah asalnya untuk berkuliah. Hal yang sama juga berlaku pada mereka yang berada di wilayah yang memiliki Perguruan Tinggi, namun tidak memiliki jurusan atau pun program studi yang diinginkan.

Biasanya, lulusan SMA/SMK dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur harus pergi keluar dari tempat asalnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi/universitas karena terbatasnya pilihan jurusan/program studi yang tersedia di tempat asal mereka. Universitas yang lazim menjadi sasaran mereka salah satunya Universitas Mulawarman yang terdapat di Kota Samarinda, sekaligus universitas terbesar yang ada di Kalimantan Timur. Adapun alternatif lainnya yaitu menempuh pendidikan tinggi ke luar provinsi bahkan ke luar Kalimantan demi mengejar jurusan/program studi yang diinginkan, prestise dari kampus terkenal di Indonesia, maupun melalui program beasiswa dan sekolah kedinasan.

Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik no. 37 Tahun 2010. Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 210 wilayah perkotaan dan 1.225 wilayah perdesaan di Kalimantan Timur.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021



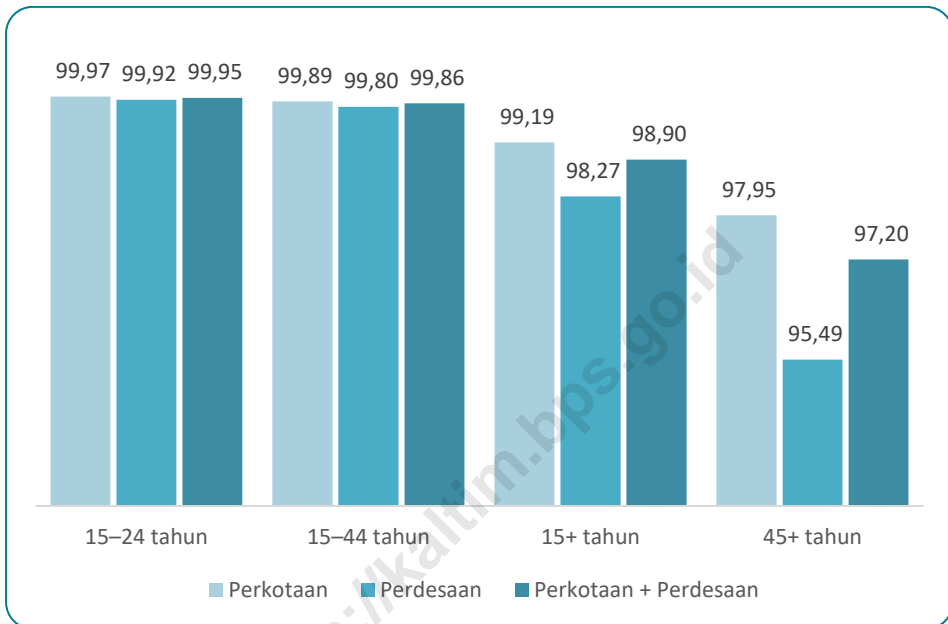
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk rentang usia 7-12 tahun baik di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan di Kalimantan Timur pada tahun 2021 cenderung tidak jauh berbeda, dengan capaian yang sudah mendekati 100 persen. Begitu pula untuk rentang usia 13-15 tahun. Akan tetapi, untuk rentang usia 16-18 tahun, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Capaian APS pada rentang usia 16-18 tahun di wilayah perdesaan sebesar 79,41 persen, cukup jauh di bawah capaian APS pada rentang usia yang sama di wilayah perkotaan yang mencapai 83,12 persen. Ini menunjukkan masih sangat rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang SMA/ sederajat, khususnya di wilayah perdesaan. Padahal, pelaksanaan pendidikan 12 tahun merupakan salah satu prioritas upaya untuk menuju tercapainya kualitas SDM terbaik.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf Jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas diukur melalui penghitungan Angka Melek Huruf (AMH). Membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Karenanya,

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Gambar 3.5 Angka Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Pada penduduk dalam rentang usia 15-24 tahun dan 15-44 tahun, tidak terlihat perbedaan yang berarti antara Angka Melek Huruf di wilayah perkotaan maupun perdesaan di Kalimantan Timur tahun 2021. Bahkan, dapat dikatakan bahwa baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan pada kedua rentang usia tersebut, capaian AMH sudah sangat mendekati 100 persen. Sedangkan apabila rentang usianya diperluas menjadi 15 tahun ke atas tanpa batas usia tertua, mulai terlihat masih adanya perbedaan antara capaian AMH di wilayah perkotaan yang cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Bahkan pada penduduk usia 45 tahun ke atas, perbedaannya terlihat cukup jelas, sebesar 97,95 persen

untuk wilayah perkotaan, dan 95,49 persen untuk wilayah perdesaan. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan pada beberapa dekade silam. Sisi baiknya, ketimpangan pendidikan dasar ini saat ini sudah mulai memudar, yang ditunjukkan dengan capaian AMH pada penduduk usia 15-24 tahun dan 15-44 tahun yang sudah sama tinggi (mendekati 100 persen), baik yang di perkotaan maupun perdesaan.

<https://kaltim.bps.go.id>

BAB IV PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



<https://kaltim.bps.go.id>



BAB IV Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur

Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diharapkan akan semakin cerdas, semakin kreatif dan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

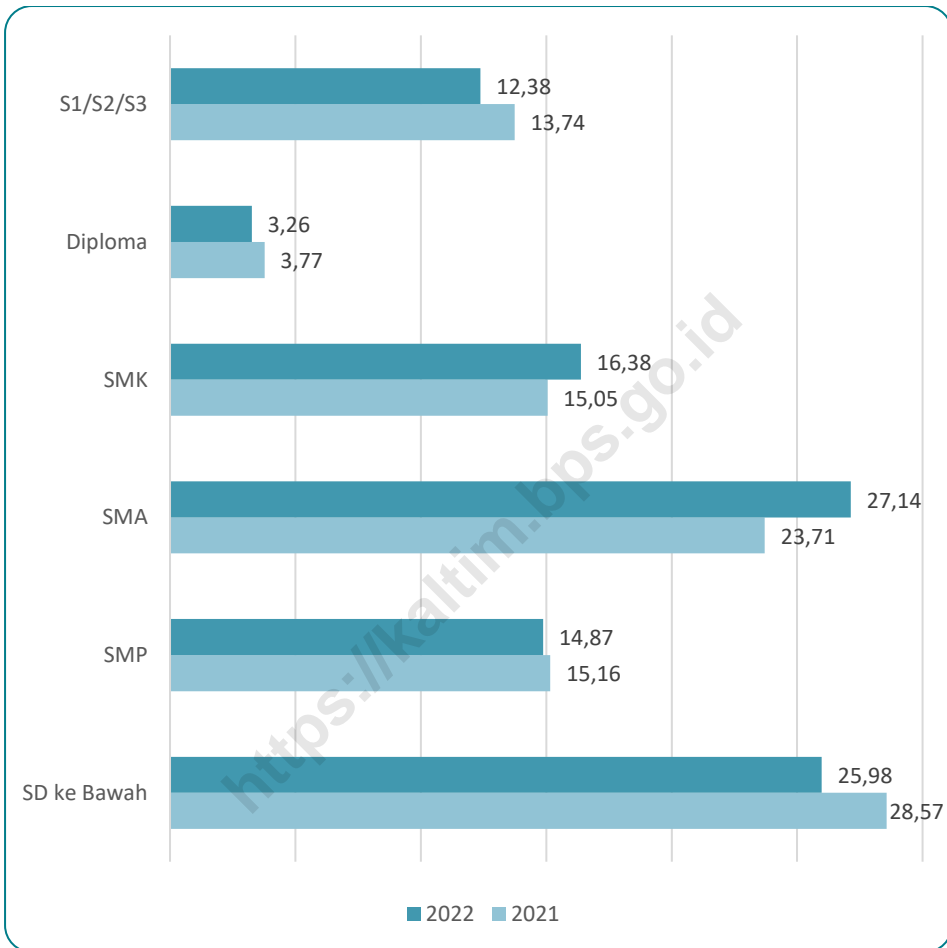
Pendidikan juga diyakini merupakan salah satu indikator kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan, maka nilai tambah berupa imbalan yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tenaga Kerja

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). Kualitas penduduk yang bekerja dapat dilihat dari kelompok umur dan tingkat pendidikan. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, berimbas pada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut umur. Suksesnya program wajib belajar 9 tahun telah menggeser angkatan kerja usia muda lebih banyak yang bersekolah yang berdampak pada berkurangnya proporsi tenaga kerja usia muda.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma dan Sarjana ke atas. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA dan SMK. Kedua hal ini juga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk bekerja. Penurunan juga terjadi pada penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi SMP dan SD ke bawah.

Gambar 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021-2022



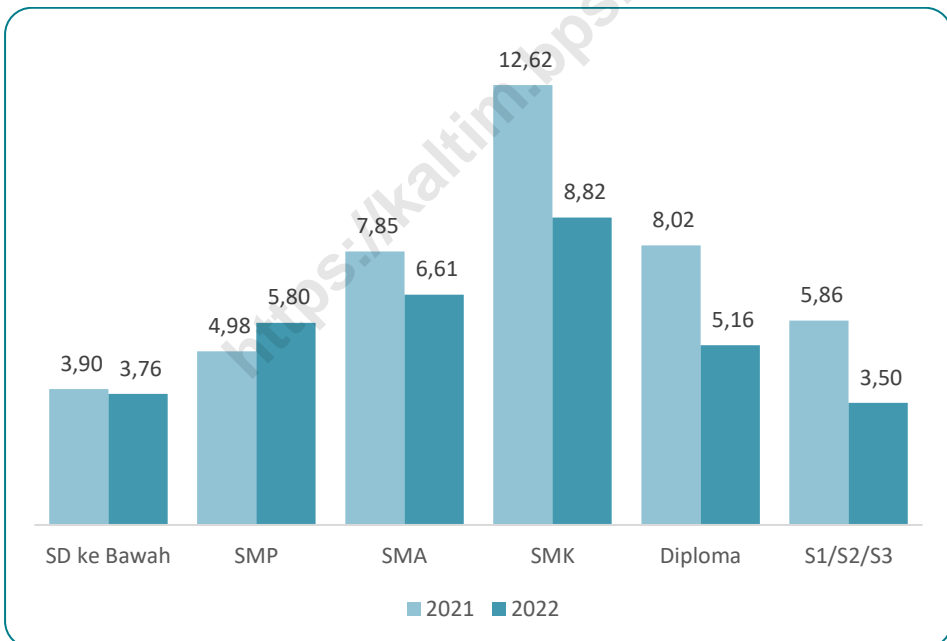
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Sakernas Agustus

Secara umum, penduduk bekerja di Kalimantan Timur tahun 2022 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan tertinggi Sekolah Menengah Atas (27,14 persen). Terjadi pergeseran pola jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar ke bawah, sebesar 28,57 persen pada 2021 dan turun menjadi 25,98 persen pada 2022.

Pengangguran Terdidik

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan rasio dari penduduk yang sedang tidak bekerja terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besaran angka TPT dihitung untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pengangguran terdidik adalah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dan tidak bekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar kemungkinan untuk menganggur. Penyebab dari situasi ini adalah karena mereka yang tidak terdidik tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka kalau tidak bekerja, sehingga mereka akan mau untuk melakukan apa saja agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, meskipun hanya bekerja seadanya saja

dan secara terbatas. Sedangkan bagi yang bisa memperoleh pendidikan lanjutan, mereka hanya mau bekerja kalau pekerjaan itu memberi uang, status, atau kepuasan yang relatif tinggi (Todaro, 2000).

Secara garis besar, pada tahun 2022 terjadi penurunan pada angka tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali pada lulusan SMP. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada angkatan kerja lulusan SMA dan SMK yang masih menjadi yang tertinggi. Hal ini lebih dikarenakan lulusan SMP ke bawah cenderung lebih memilih untuk bekerja di lapangan kerja sektor informal, sementara lulusan SMA ke atas cenderung masih berusaha untuk bekerja di sektor formal. Di sisi lain, lulusan SMA/SMK menjadi golongan yang paling tertekan akibat kian ketatnya persaingan dalam dunia kerja. Pada umumnya, sektor pekerjaan formal membutuhkan ijazah Diploma atau di atasnya sebagai syarat utama bagi pelamar. Bahkan untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah perguruan tinggi pun sering menerapkan batasan umur bagi pelamarnya. Adanya batasan umur padangan lapangan kerja sektor formal tersebut sedikit banyak juga turut mempersulit pelamar kerja.

Secara asumsi, meningkatnya lulusan perguruan tinggi yang diikuti dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja formal dapat mengurangi tingkat pengangguran. Namun faktanya, kondisi di lapangan tidak selalu menunjukkan adanya kesetimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan tersedianya lapangan kerja formal sehingga membawa dampak munculnya fenomena pengangguran terdidik. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara bidang ilmu yang dikuasai oleh lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja juga turut menjadi faktor pendukung fenomena tersebut. Selain itu, pengangguran terdidik juga cenderung lebih selektif dalam memilih dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan ketertarikannya.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang diutarakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pendidikan di Kalimantan Timur masih belum merdeka dari berbagai masalah. Meskipun capaian pada indikator Harapan Lama Sekolah untuk laki-laki dan perempuan sudah cenderung sama tinggi, masih terlihat adanya

ketimpangan pada capaian Rata-rata Lama Sekolah di antara kedua kelompok tersebut, walaupun jaraknya sudah semakin mengecil.

Selain itu, belum optimalnya tingkat penyelesaian pendidikan maupun angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA ke atas masih perlu menjadi perhatian khusus, sebab kondisi tersebut mengindikasikan masih tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, serta rendahnya angka partisipasi pada jenjang SMA/ sederajat di Kalimantan Timur. Bahkan pada jenjang Perguruan Tinggi, angka partisipasinya jauh lebih rendah lagi. Hal tersebut utamanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi keluarga, minat individu untuk melanjutkan kuliah, serta keterbatasan akses ke perguruan tinggi di suatu wilayah.

Secara umum, fasilitas sekolah tingkat dasar di Kalimantan Timur sudah tersebar hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota. Begitu pula dengan fasilitas sekolah tingkat menengah pertama dan atas. Namun, fasilitas Perguruan Tinggi masih menjadi hal yang mewah bagi sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur, sebab sebarannya sangat terkonsentrasi pada wilayah Kota Samarinda dan Balikpapan saja.

Sangat diharapkan dalam hal pendidikan di Indonesia, dan di Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya, tidak akan ada lagi halangan dalam bentuk apa pun, baik ekonomi, wilayah, maupun diskriminasi gender. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan merata dan meningkatnya kualitas pendidikan, diharapkan akan meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia dalam pembangunan, yang juga akan turut meningkatkan kualitas generasi mendatang dan juga dapat turut dinikmati oleh generasi saat ini di masa depan.

BAB V

PERKEMBANGAN

KESEJAHTERAAN

RAKYAT



BAB V Perkembangan Kesejahteraan Rakyat

Kependudukan

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Selain sebagai subyek pembangunan, di mana penduduk berperan sebagai penggerak pembangunan, penduduk juga merupakan obyek pembangunan. Ini berarti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah seharusnya dapat dinikmati hasilnya bagi peningkatan kesejahteraan penduduk.

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Rasio Jenis Kelamin per Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

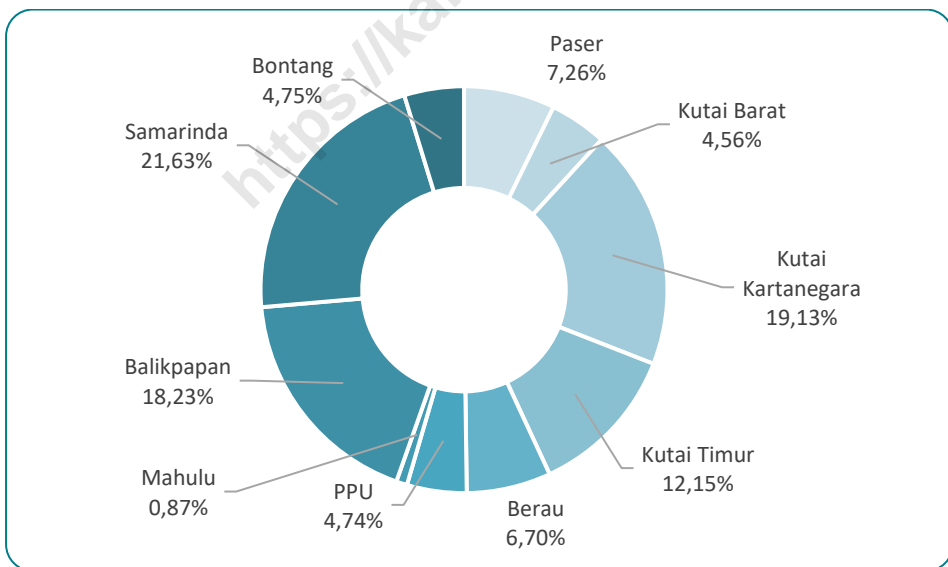
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
Paser	280 065	108,3
Kutai Barat	175 998	112,1
Kutai Kartanegara	738 189	108,4
Kutai Timur	468 820	116,8
Berau	258 537	115,2
PPU	183 043	106,7
Mahulu	33 535	113,1
Balikpapan	703 611	104,5
Samarinda	834 824	103,6
Bontang	183 161	107,4
Kalimantan Timur	3 859 783	108,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan kondisi kependudukan, termasuk di dalamnya kapasitas penduduk suatu wilayah. Salah satu aspek yang perlu dipahami terkait kependudukan adalah struktur penduduk. Struktur penduduk menjadi penting karena perilaku dan kebutuhan ekonomi manusia akan berubah sesuai tahapan kehidupan.

Jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Laju perubahan pada masing-masing faktor tersebut sangat menentukan besaran jumlah dan struktur penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Dari tahun ke tahun penduduk Kalimantan Timur selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 3,86 juta jiwa. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 108, ini menunjukkan bahwa terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 5.1 Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur masih terpusat di beberapa wilayah saja, terutama di sekitar wilayah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2022, Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur menampung

sebanyak 21,63 persen dari total keseluruhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Disusul oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, masing-masing sebesar 19,13 persen dan 18,23 persen. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit di antara kabupaten/kota lainnya, hanya sebesar 0,87% dari total keseluruhan penduduk Kalimantan Timur.

Tabel 5.2 Luas Daerah (Km²) dan Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km²) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)
Paser	11 096,96	25,24
Kutai Barat	13 709,92	12,84
Kutai Kartanegara	25 988,08	28,40
Kutai Timur	31 051,71	15,10
Berau	21 735,19	11,89
PPU	2 923,73	62,61
Mahakam Ulu	19 449,41	1,72
Balikpapan	512,25	1 373,57
Samarinda	716,53	1 165,09
Bontang	163,14	1 122,72
Kalimantan Timur	127 346,92	29,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk, kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah 29,12 jiwa per km². Artinya, setiap 1 km² wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh 29 jiwa penduduk. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 1.373,57 jiwa per km² dan 1.165,09 jiwa per km². Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur, berada di bawah 2

jiwa per km² (1,72). Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan persebaran penduduk antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang tinggi terpusat di wilayah perkotaan. Akibatnya, pola persebaran dan kepadatan penduduk yang demikian cenderung kurang menguntungkan bagi pengembangan daerah, karena berpotensi terjadi perbedaan pendapatan yang cukup tinggi antara wilayah kabupaten dan wilayah kota.

Berdasarkan status perkawinan, penduduk usia 10 tahun ke atas bisa dibagi menjadi berstatus belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Status kawin tidak hanya bagi mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. Selain berpengaruh terhadap tingkat fertilitas di suatu wilayah, status perkawinan juga memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dengan adanya status legal lembaga perkawinan. Di beberapa negara, masyarakat yang terikat dalam perkawinan dapat menikmati manfaat berupa program-program peningkatan kesejahteraan yang ditujukan bagi masyarakat yang tercatat secara sah dalam lembaga perkawinan.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	33,75%	29,64%	33,75%
Kawin	59,35%	61,13%	59,35%
Cerai Hidup	2,35%	2,41%	2,35%
Cerai Mati	4,55%	6,82%	4,55%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2021 proporsi penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin (33,75 persen) lebih besar dibanding penduduk perempuan (29,64 persen). Sebaliknya, proporsi penduduk perempuan yang berstatus pernah kawin (kawin, cerai hidup, dan cerai mati) lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Tabel 5.4 Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021

Tahun	Pernikahan	Perceraian
(1)	(2)	(3)
2018	24 979	7 749
2019	26 080	8 902
2020	25 030	7 012
2021	22 386	8 001

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Islam

Terjadi penurunan jumlah pernikahan pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun, angka perceraian pada periode yang sama mengalami peningkatan. Jumlah pernikahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebanyak 22.386, turun 19,74 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun angka perceraian mengalami peningkatan dari 7.012 kasus pada tahun 2020 menjadi 8.001 kasus di tahun 2021.

Tabel 5.5 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2021

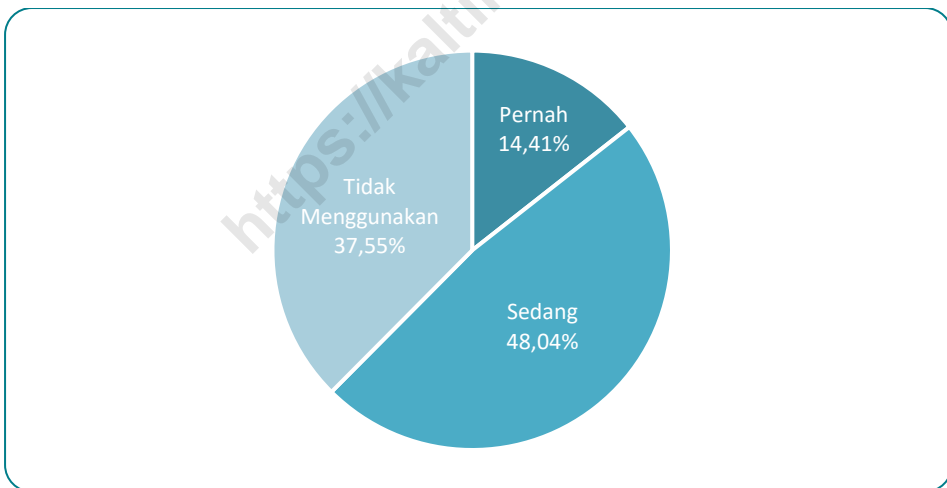
Tahun	< 19 Tahun	≥ 19 Tahun
(1)	(2)	(3)
2018	30,72	69,27
2019	33,05	66,95
2020	32,08	67,92
2021	30,88	69,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Perempuan yang pernah kawin mencakup perempuan yang status perkawinannya kawin maupun cerai. Usia minimal pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019, yang salah satu poinnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun pada kenyataannya, hingga tahun 2021 perempuan berumur di bawah 19 tahun yang pernah kawin di Provinsi Kalimantan Timur masih terbilang tinggi, berada di kisaran 30 persen dari total keseluruhan perempuan. Padahal, perempuan yang kawin pada usia sangat muda cenderung belum memiliki kesiapan yang matang, baik secara mental maupun fisiknya. Risiko yang dihadapi cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan, sehingga dapat berpengaruh pada keselamatan ibu dan anak. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menunda usia perkawinan pertama seorang perempuan. Selain itu, dengan pengetahuan yang lebih baik, maka dapat muncul pemahaman mengenai risiko kesehatan pada perkawinan usia muda bagi ibu, sehingga membantu seorang perempuan dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan perkawinan pada usia yang terlalu muda.

Gambar 5.2 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Partisipasi KB di Provinsi Kalimantan Timur, 2021



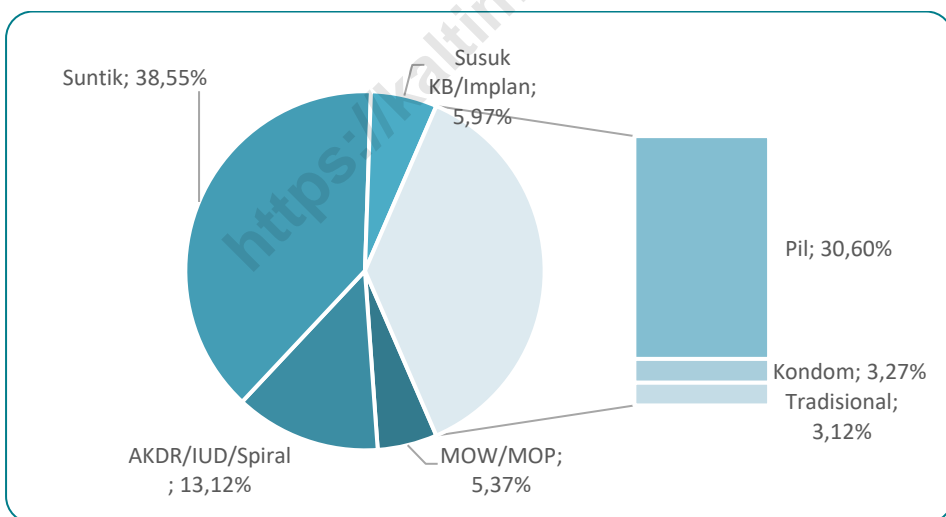
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Menunda/menjarangkan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi merupakan upaya untuk menurunkan tingkat fertilitas. Pilihan penggunaan alat/cara KB oleh akseptor di antaranya dipengaruhi oleh harga, ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses alat/cara tersebut, dan sebagainya. Jika terjadi kenaikan harga alat kontrasepsi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan pemakaian alat

kontrasepsi akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi dapat mempengaruhi pilihan penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi jika tersedia dan mudah diperoleh, ada kecenderungan alat kontrasepsi tersebut akan digunakan.

Pada tahun 2021, sebanyak 14,41 persen perempuan kawin berumur 15-49 tahun di Kalimantan Timur menyatakan pernah menggunakan alat/cara KB namun sudah tidak menggunakan lagi. Sementara yang menyatakan sedang menggunakan alat/cara KB ada sebanyak 48,04 persen dan sisanya yang menyatakan tidak pernah menggunakan alat/cara KB karena satu dan lain hal ada sebanyak 37,55 persen. Tingginya angka yang menyatakan tidak menggunakan alat/cara KB bisa jadi karena minimnya pengetahuan akan manfaat dan kegunaan dari KB.

Gambar 5.3 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Cara KB yang Digunakan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan jenis alat kontrasepsi, suntikan dan pil merupakan alat KB yang banyak digunakan oleh perempuan pernah kawin (usia 14-49 tahun) di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, suntikan digunakan oleh sekitar 38,55 persen akseptor KB dan pil digunakan oleh 30,60 persen akseptor KB. Tingginya prevalensi pemakaian kedua alat KB ini karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kedua alat/cara KB ini relatif lebih terjangkau, praktis, dan

lebih mudah didapatkan. Di sisi lain, masih terdapat sekitar 3,12 persen yang masih menggunakan cara-cara tradisional, seperti metode menyusui alami, pantang berkala atau metode tradisional lainnya.

Tabel 5.6 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Partisipasi KB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2021

Kabupaten/Kota	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	15,56	54,28	30,16
Kutai Barat	17,63	55,36	27,01
Kutai Kartanegara	15,72	52,54	31,73
Kutai Timur	16,87	53,58	29,55
Berau	13,73	41,20	45,07
Penajam Paser Utara	9,69	56,50	33,81
Mahulu	11,70	54,58	33,72
Balikpapan	10,08	44,10	45,83
Samarinda	14,14	42,23	43,63
Bontang	19,93	42,56	37,52
Kalimantan Timur	14,41	48,04	37,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, penduduk perempuan yang sedang menggunakan KB dengan persentase terbesar yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 56,50 persen. Sedangkan yang paling kecil yaitu di Kabupaten Berau, hanya 41,20 persen. Sementara itu, terlihat bahwa persentase penggunaan KB di ketiga kota di Provinsi Kalimantan Timur juga masih berada di bawah 50 persen. Ini merupakan hal yang patut menjadi perhatian, karena secara umum penduduk wilayah perkotaan diasumsikan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait peran penting penggunaan alat KB untuk pengendalian kelahiran. Selain itu, di wilayah perkotaan umumnya

aksesibilitas untuk memperoleh alat KB lebih mudah dibandingkan di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran masyarakat di wilayah perkotaan untuk berpartisipasi dalam program berencana lebih tinggi jika dibandingkan masyarakat yang berada di wilayah perdesaan.

Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan manusia yang berkualitas. Dengan adanya pembangunan manusia yang berkualitas maka akan mampu menciptakan kesejahteraan hidup manusia di suatu wilayah. Kesehatan juga merupakan hak setiap warga dan dijamin oleh pemerintah. Di dalam Nawacita yang kelima disebutkan bahwa peningkatan kualitas hidup manusia salah satunya dilakukan melalui program “Indonesia Sehat” guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pembangunan di bidang kesehatan, terutama difokuskan pada kegiatan yang berorientasi pada aktivitas promotif dan preventif bagi SDM yang sehat, dengan tidak meninggalkan aktivitas yang bersifat kuratif dan rehabilitatif bagi SDM yang mengalami sakit. Hal ini disebabkan karena secara langsung ataupun tidak langsung gangguan kesehatan atau penyakit akan mempengaruhi produktivitas dan perekonomian rumah tangga. Gangguan kesehatan menimbulkan biaya untuk pengobatan, hilangnya waktu kerja atau sekolah, dan berpotensi pada hilangnya aset keluarga. Dengan kata lain, sakit secara langsung meningkatkan pengeluaran rumah tangga, yaitu biaya pengobatan (termasuk transportasi).

Selain itu, pada penduduk usia produktif, jika terjadi gangguan kesehatan atau sakit akan dapat mempengaruhi pendapatan yang akan diterimanya, sedangkan pada kelompok anak sekolah akan kehilangan waktu untuk menuntut ilmu. Pada kasus penyakit kronis atau berat, orang akan terpaksa menjual aset keluarga (seperti: tanah, rumah, perhiasan, dan lain-lain) untuk biaya pengobatan.

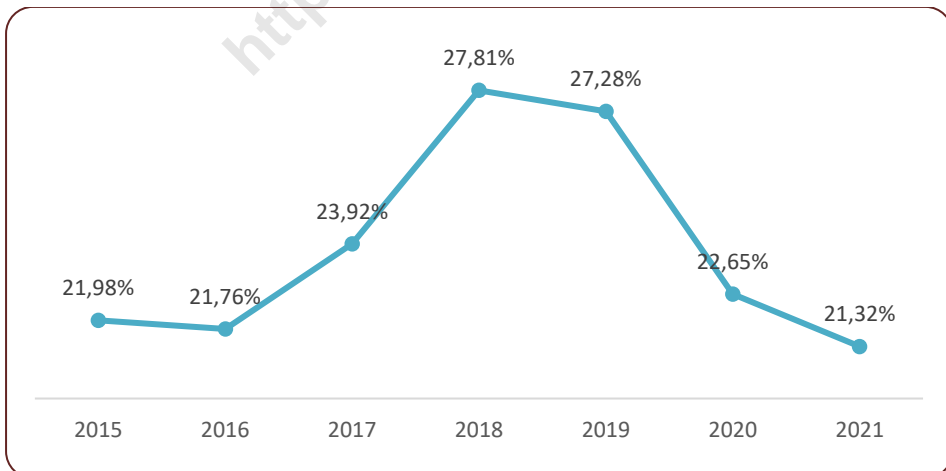
Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadaan sehat, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Kualitas fisik penduduk dapat dilihat salah satunya dari kondisi kesehatan penduduk tersebut. Penduduk yang sehat maka kualitas fisiknya juga bagus. Kualitas fisik penduduk yang bagus akan memperlancar kehidupan penduduk tersebut baik dalam bekerja, bersekolah maupun mengurus rumah tangga serta melakukan aktivitas lainnya. Sedangkan penduduk yang sakit-sakitan akan menyebabkan tersendatnya setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan sehingga akan berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga tersebut. Penduduk yang dalam kondisi sakit akan terlihat dari gejala awal serta diikuti dengan keluhan-keluhan.

Keluhan kesehatan adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit akut, kecelakaan, kriminal, penyakit kronis (meskipun selama sebulan lalu tidak mempunyai keluhan) maupun hal lain. Sekecil apa pun gangguan kesehatan yang dialami seseorang seharusnya segera diatasi agar tidak menimbulkan sakit yang berkelanjutan.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Selama beberapa tahun terakhir, tingkat keluhan kesehatan penduduk Kalimantan Timur cukup berfluktuatif. Tingkat keluhan kesehatan pada tahun 2015 hingga tahun 2018 terus naik tiap tahunnya. Tingkat keluhan kesehatan pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi pada periode 2015-2019, sebesar 27,81 persen. Pada tahun 2020, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada proporsi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2020 adalah sebesar 22,65 persen, lebih kecil jika dibandingkan persentase di tahun 2019 yang sebesar 27,28 persen. Bahkan, di tahun 2021 persentase keluhan kesehatan merupakan yang terendah sepanjang periode 2015-2021, hanya sebesar 21,32 persen.

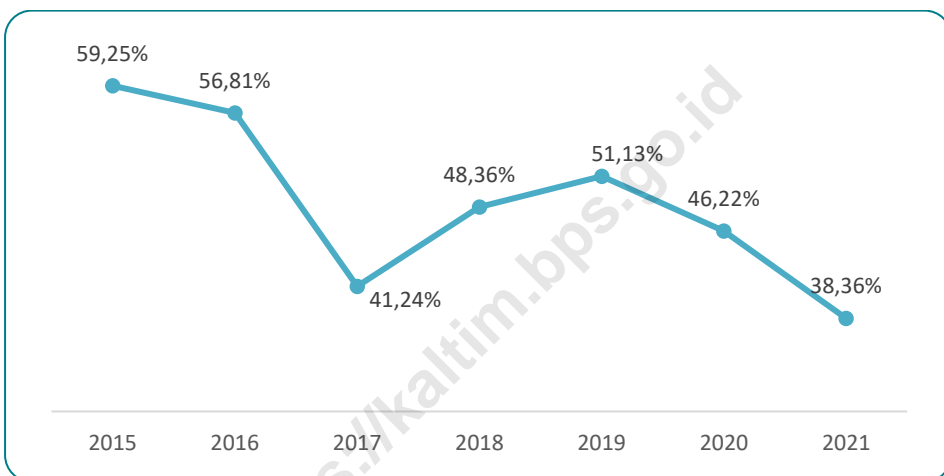
Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan sarana untuk memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat. Di satu sisi, semakin sering masyarakat melakukan konsultasi atau pengobatan/perawatan ke fasilitas kesehatan, mengisyaratkan semakin tinggi kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan. Namun di sisi lain, semakin tinggi angka kunjungan ke fasilitas kesehatan mengisyaratkan semakin tinggi juga tingkat keluhan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan agar masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dapat segera ditangani. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang sehat dan pada akhirnya akan diperoleh SDM yang cerdas dan produktif. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan harus didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang cukup baik, kemudahan akses, serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Selama periode tahun 2015-2017, persentase penduduk yang pergi berobat ketika mengalami keluhan kesehatan terus mengalami penurunan, dengan titik terendah pada tahun 2017, sebesar 41,24 persen. Angka ini mengalami kenaikan pada periode tahun 2018, menjadi 48,36 persen. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2021, angka ini cenderung mengalami penurunan, dari 51,13 persen pada 2019, menjadi 46,22 persen pada 2020, dan turun hingga 38,36 persen pada 2021. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021

ada lebih dari separuh penduduk Kalimantan Timur yang tidak pergi berobat ketika mengalami keluhan kesehatan disebabkan beberapa faktor/alasan. Antara lain karena keterbatasan biaya dan sarana transportasi, memilih untuk mengobati penyakitnya sendiri, atau bahkan merasa penyakitnya tidak terlalu parah sehingga bisa sembuh sendiri tanpa bantuan tenaga ahli.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Pergi Berobat Jalan di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tempat rujukan penduduk untuk berobat jalan dapat menggambarkan akses penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan sebagai tempat berobat penduduk terdiri dari puskesmas, praktik dokter/poliklinik dan rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta serta pengobatan tradisional. Pada tahun 2021, proporsi penduduk Kalimantan Timur yang memilih untuk berobat ke klinik/praktik tenaga kesehatan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, terjadi penurunan pada proporsi penduduk yang berobat ke Rumah Sakit maupun Puskesmas dan sejenisnya.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan tradisional masih menjadi tempat alternatif untuk berobat bagi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tradisional di sini adalah praktik pengobatan tradisional, dukun beranak dan tempat pengobatan lainnya. Pada

tahun 2021, persentase penduduk yang berobat ke praktik sejenis ini sebesar 1,49 persen, cenderung lebih tinggi jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih adanya kecenderungan penduduk Kalimantan Timur yang memilih pengobatan alternatif untuk mengobati penyakitnya, meskipun secara proporsi cenderung sangat kecil.

Tabel 5.7 Persentase Penduduk yang Pergi Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2020

Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	21,28	23,13	24,38	17,19
Klinik/Praktik Dokter/Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya	39,44	36,80	41,45	64,26
Puskesmas, Pustu, UKBM	42,03	44,11	38,98	21,39
Praktik Pengobatan Tradisional dan Lainnya	1,12	1,16	0,79	1,49

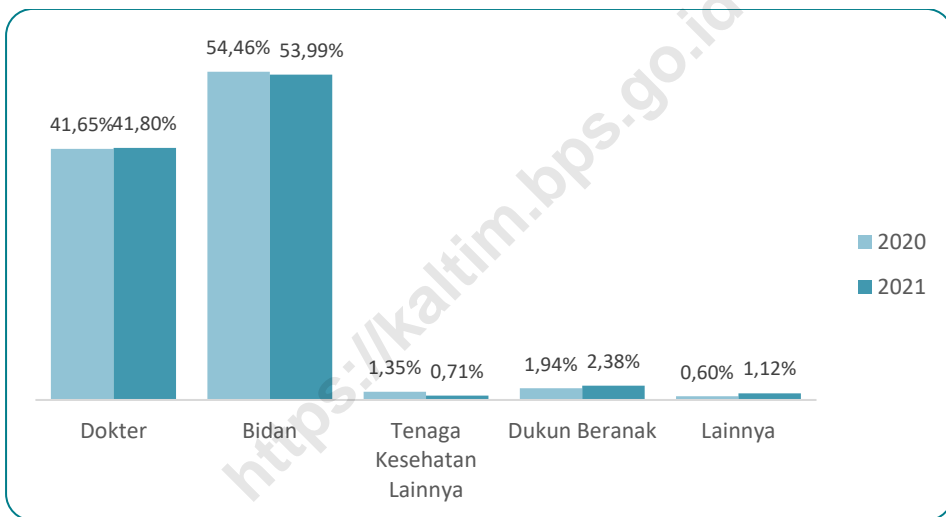
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana prasarana dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual. Persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Penolong proses kelahiran merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengurangi angka kesakitan dan angka kematian bayi, dan juga menjamin kesehatan ibu pasca melahirkan sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas.

Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Pada tahun 2020 maupun tahun 2021, wanita berumur 15-49 tahun di Provinsi Kalimantan Timur yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir sudah hampir seluruhnya dibantu oleh tenaga medis, baik oleh dokter, bidan, maupun tenaga kesehatan lainnya. Hal ini sangat baik, sebab persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dianggap lebih baik daripada yang ditolong

oleh tenaga non kesehatan seperti dukun atau lainnya. Walau demikian, masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun dan tenaga lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasanya terdapat di daerah terpencil, di mana fasilitas kesehatan di daerah tersebut masih terbilang minim dan lebih susah dijangkau dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Selain itu, faktor edukasi masyarakat juga turut mempengaruhi dalam hal pemilihan penolong persalinan.

Gambar 5.6 Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pemberian air susu ibu (ASI) memiliki peranan yang sangat penting bagi bayi. ASI mengandung semua bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain itu, ASI juga mengandung zat kekebalan tubuh (penolak/pencegah penyakit). Dengan memberikan ASI kepada balita, maka akan menciptakan ikatan batin dan menumbuhkan kasih sayang antara ibu dengan anak. Dengan berbagai macam kegunaan ASI, maka adanya kesadaran dari para ibu untuk menyusui anaknya sangat diharapkan, agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas.

Pada tahun 2021, terdapat 94,64 persen anak berusia di bawah dua tahun (baduta) di Provinsi Kalimantan Timur yang pernah diberi asupan ASI,

yang artinya ada sebanyak 5 dari 100 baduta yang tidak pernah mendapatkan asupan ASI. Adapun baduta yang masih diberikan asupan ASI hanya mencapai 79,29 persen. Ini berarti, setidaknya terdapat 20,71 persen ibu yang tidak tuntas menyusui hingga bayinya berumur 24 bulan. Berdasarkan jenis kelamin, persentase baduta perempuan yang masih diberi asupan ASI cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan baduta laki-laki.

Tabel 5.8 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah dan Masih Diberi ASI menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Jenis Kelamin	Pernah Diberi ASI	Masih Diberi ASI
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	94,64%	81,59%
Perempuan	94,64%	76,84%
Total	94,64%	79,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu komponen penting untuk mengetahui kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Adanya SDM yang berkualitas akan mampu mendorong dan menciptakan kesejahteraan hidup penduduk di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang pendidikan sangat diperlukan di suatu wilayah. Pembangunan pendidikan di suatu wilayah tidak hanya membutuhkan kerja sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga dari penduduk di wilayah tersebut. Jika hanya salah satu yang bergerak maka tidak akan berhasil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyedia layanan pendidikan dan penjamin kegiatan pendidikan tersebut, sedangkan penduduk sebagai objek yang harus memiliki kemauan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan setiap warga negara Indonesia juga sudah dijamin oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 tentang Pendidikan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiauyainya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat perhatian dengan masalah pendidikan warga negaranya, dan warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan tersebut.

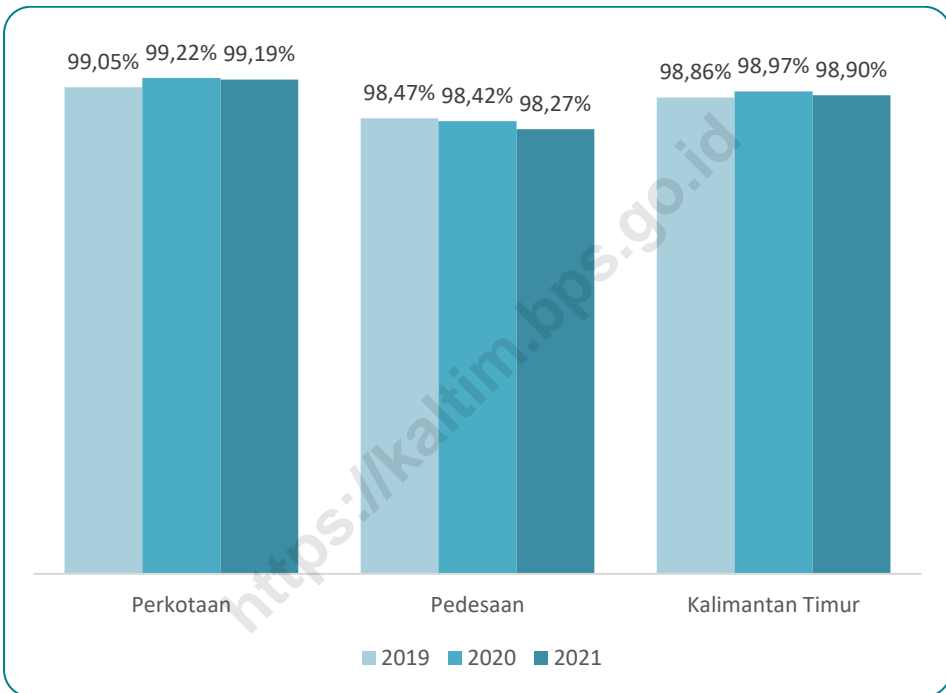
Selain itu Pemerintah juga memiliki Undang-undang (UU) mengenai pendidikan yaitu UU No. 20 tahun 2003. Dari UU tersebut dapat di simpulkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tentu saja semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tersebut. Semua hal yang terkait dalam pendidikan ada terinci di dalam UU tersebut. Hal ini juga menandakan betapa pemerintah sangat peduli dengan pendidikan setiap warganya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa tidak hanya dari sisi pemerintah saja, seharusnya masyarakat pun harus sadar dengan pentingnya pendidikan sehingga mereka bisa melakukan dengan sukarela dengan begitu hasilnya akan lebih baik lagi. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakatlah yang akan menjadikan hasilnya lebih maksimal.

Kondisi pembangunan bidang pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan, yang terdiri dari tiga jenis yaitu indikator *input*, indikator proses, dan indikator *output*. Indikator *input* merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator *input* adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator *output* merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator *output* antara lain angka melek huruf (AMH), angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

Salah satu cara untuk melihat kemampuan di bidang pendidikan bisa dilihat dari kemampuan membaca dan menulis (melek huruf). Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal dasar untuk seseorang memasuki jenjang pendidikan dasar. Setelah seorang anak mampu membaca dan menulis maka akan memudahkannya dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah, sehingga dia dapat dengan mudah melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih

tinggi. Selain sebagai hal mendasar, membaca dan menulis sangat penting, seperti yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi seluruh warga masyarakat. Dengan mampu membaca dan menulis pemerintah berharap dapat menekan angka buta huruf di Indonesia.

Gambar 5.7 Persentase Penduduk Berumur 15+ Tahun yang Melek Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Dari tahun 2019 ke tahun 2021, angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami fluktuasi, namun perbedaan tiap tahunnya tidak terlalu signifikan. Pada periode yang sama, angka melek huruf di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Secara keseluruhan, angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Timur bisa dikatakan sudah cukup baik, yang terlihat dari capaiannya yang mendekati 100 persen.

Selain kemampuan baca tulis (angka melek huruf), untuk melihat apakah pendidikan di suatu wilayah cukup berhasil atau tidak, bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau bisa dilihat dari ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Semakin banyak penduduk yang memiliki ijazah jenjang pendidikan yang tinggi, maka semakin bagus kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Dan juga menandakan adanya pemerataan dalam hal pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, terjadi penurunan pada persentase penduduk usia 15+ tahun di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak mempunyai ijazah sama sekali jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019).

Tabel 5.9 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2021

Ijazah/STTB Tertinggi	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Mempunyai Ijazah	11,86	10,06	9,40	8,21
SD/ sederajat	21,10	20,13	19,88	19,95
SMP/ sederajat	21,33	21,43	21,19	21,29
SMA/ sederajat	27,02	28,88	29,43	32,06
SMK	7,18	7,94	8,27	6,28
Perguruan Tinggi/ Universitas	11,51	11,55	11,83	12,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mengetahui proporsi penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, maka digunakan indikator angka partisipasi sekolah (APS). APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk berumur tertentu serta menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Tabel 5.10 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7-18 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021

Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12 Tahun	99,76%	99,68%	99,73%	99,60%
13-15 Tahun	98,89%	98,83%	99,07%	98,90%
16-18 Tahun	81,55%	81,81%	81,88%	82,10%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pada penduduk rentang usia 7-12 dan 13-15 tahun di Kalimantan Timur tahun 2021, capaian angka partisipasi sekolah sudah mendekati 100 persen. Ada pun pada rentang usia sekolah 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah (APS) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 82,10 persen. Artinya, sebanyak 82,10 persen penduduk pada rentang usia tersebut sedang menempuh bangku pendidikan dan 17,90 persen sisanya tidak bersekolah, baik karena sudah lulus dari pendidikan jenjang SMA/ sederajat dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, putus sekolah, atau pun tidak pernah bersekolah.

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Beberapa faktor penyebab putus sekolah adalah karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.

Angka putus sekolah dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat aksesibilitas pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur, serta sekaligus gambaran kemampuan ekonomi orang tua. Perkiraan jumlah putus sekolah menggunakan pendekatan kelompok penduduk berumur 7-18 tahun

yang sudah tidak bersekolah lagi termasuk penduduk yang tamat SD, SLTP dan SLTA, tapi tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena usia ini merupakan usia yang ideal untuk menyelesaikan pendidikannya.

Tabel 5.11 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021

Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
7-12 Tahun	0,00%	0,16%	0,14%	0,04%
13-15 Tahun	0,86%	0,98%	0,88%	0,52%
16-18 Tahun	18,14%	18,12%	17,98%	17,92%

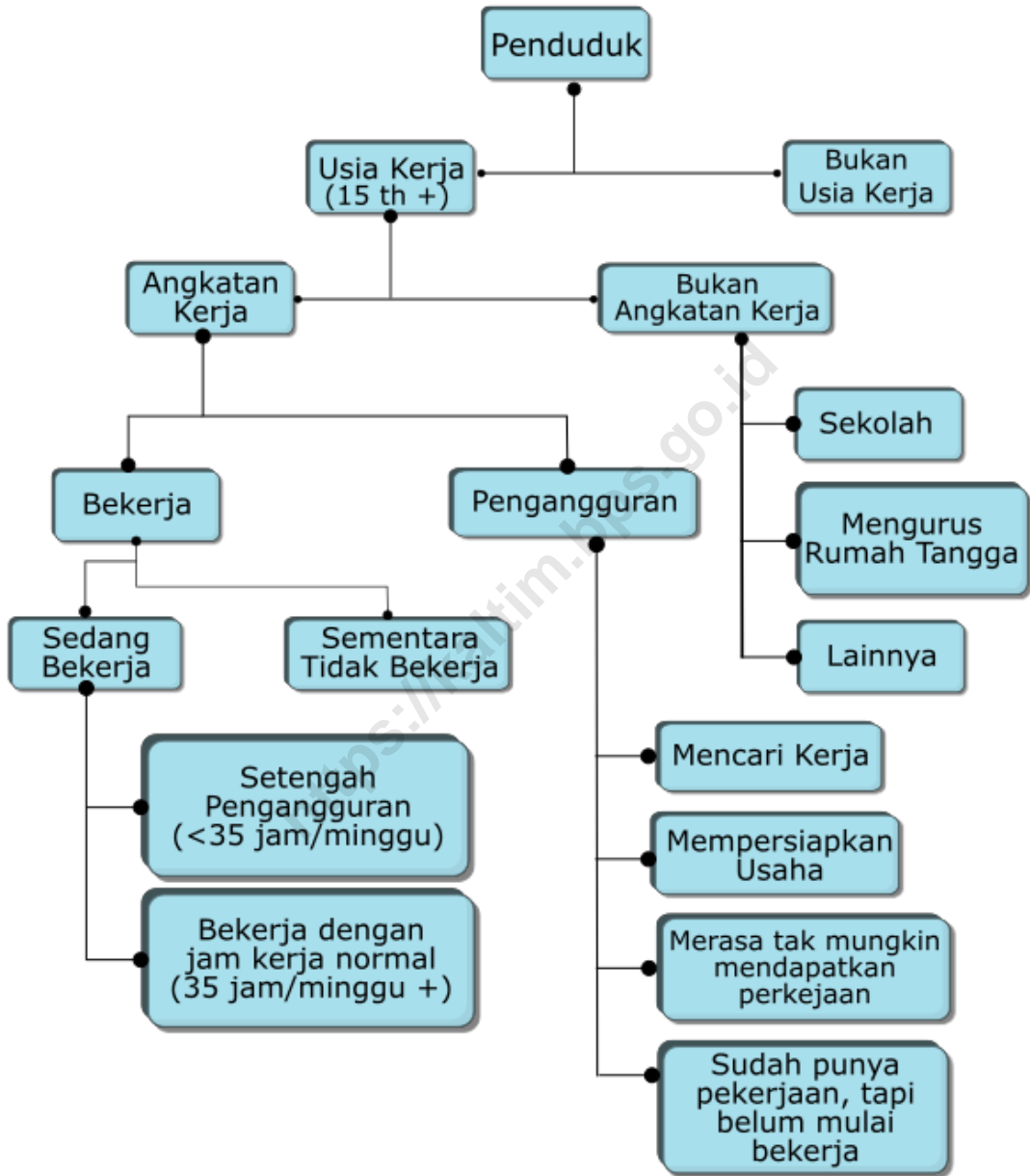
Sumber: Susenas Maret 2018,2019 dan 2020, diolah

Secara keseluruhan, angka putus sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, angka putus sekolah pada kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun sudah mendekati nol persen. Di sisi lain, angka putus sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun masih terbilang tinggi, sebesar 17,92 persen. Harus diingat bahwa ini bukan angka yang kecil, mengingat angka tersebut menunjukkan bahwa ada 17,92 persen anak berumur 16-18 tahun yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena alasan tertentu.

Ketenagakerjaan

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan merupakan modal bagi Bergeraknya perekonomian negara. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai bidang. Karena di dalam proses produksi barang dan jasa, manusia merupakan faktor yang paling penting dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lain yaitu sebagai tenaga kerja yang dapat menjalankan dan menggunakan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jumlah tenaga kerja yang tepat serta kualitas yang baik dapat meningkatkan produktivitas.

Gambar 5.8 Diagram Ketenagakerjaan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.12 Persentase Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-24 Tahun	22,62%	23,66%	23,32%	22,98%
25-54 Tahun	62,99%	60,56%	60,31%	60,07%
55+ Tahun	14,39%	15,78%	16,36%	16,96%

Sumber: Proyeksi SP2010, hasil SP2020, dan Proyeksi Interim SP2020, diolah

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan usia kerja adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun. Kelompok usia 15-24 tahun adalah kelompok usia yang sudah dikategorikan menjadi kelompok usia kerja, meskipun semestinya mereka masih harus sekolah. Kelompok usia 25-54 tahun adalah mereka yang produktif dalam pasar kerja, dan usia 55+ adalah mereka yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam pasar kerja.

Pada tahun 2022, penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh kelompok usia 25-54 tahun, yaitu sebesar 60,07 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja. Sementara itu, untuk penduduk usia 15-24 tahun ada sekitar 22,98 persen dan untuk penduduk kelompok umur 55 tahun ke atas sebesar 16,96 persen. Angka ini cukup menggembirakan karena ini berarti persentase penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh mereka yang berada pada rentang usia produktif. Meskipun demikian, jika melihat tren pada kurun waktu tahun 2019-2022, terdapat kecenderungan penuaan populasi penduduk Kalimantan Timur, yang terlihat dari meningkatnya persentase penduduk kelompok usia 55 tahun ke atas dari tahun ke tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, yang berpotensi untuk dapat terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Selain itu, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi juga dapat diukur oleh banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan penganggur). Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin besar pula proporsi penduduk usia

kerja yang memasuki pasar kerja atau yang sesungguhnya terlibat secara ekonomi atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 5.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	83,04%	81,52%	81,35%	82,74%
Perempuan	47,17%	47,96%	48,20%	45,17%
Total	65,96%	65,50%	65,49%	64,73%

Sumber: Sakernas Agustus

Pada tahun 2022, TPAK di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 64,73 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang (2019 dan 2021). TPAK laki-laki tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dan sebaliknya, TPAK perempuan mengalami penurunan. Dilihat secara besaran, TPAK laki-laki hampir dua kali lipat dari TPAK perempuan, masing-masing sebesar 82,74 dan 45,17 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan rasio dari penduduk yang sedang tidak bekerja terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja. Yang termasuk ke dalam kategori penduduk yang tidak sedang bekerja adalah penduduk yang tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan) tetapi sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (menganggur). Nilai TPT dapat digunakan sebagai representasi aksesibilitas pekerjaan (kesempatan kerja). Jika TPT semakin besar maka kesempatan bekerja akan berkurang, dan sebaliknya apabila kesempatan bekerja besar maka TPT akan berkurang atau semakin kecil.

Tabel 5.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	6,03%	7,25%	7,22%	5,12%
Perempuan	5,77%	6,17%	6,13%	6,90%
Total	5,94%	6,87%	6,83%	5,71%

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Sakernas Agustus

Secara umum, TPT Kalimantan Timur pada tahun 2022 merupakan yang terendah sepanjang periode tahun 2019-2022. Menariknya, di saat TPT laki-laki di tahun 2022 mengalami penurunan, TPT perempuan justru mengalami kenaikan. Ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kesempatan kerja pada angkatan kerja perempuan.

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha/pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha/bidang kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat penduduk bekerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja.

Dari tahun ke tahun, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor Perdagangan dan sektor Pertanian, di mana serapan tenaga kerja pada masing-masing sektor tersebut selalu berada di kisaran angka 20 persen. Meskipun kedua lapangan usaha tersebut bukan penyumbang *share* PDRB yang terbesar, namun pada praktiknya kedua lapangan usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Bahkan, sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang hampir separuh dari total PDRB Kalimantan Timur hanya mampu menyerap sekitar 7,47 persen dari keseluruhan penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, yang bahkan lebih sedikit jika dibandingkan dengan penyediaan akomodasi dan makan minum (7,60 persen) di tahun yang sama. Padahal, *share* PDRB sektor akomodasi dan makan minum jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pertambangan dan penggalian.

Tabel 5.15 Persentase Penduduk 15+ Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2020-2022

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,48	20,84	20,00
Pertambangan dan Penggalian	7,27	7,10	7,47
Industri Pengolahan	6,23	6,59	7,52
Pengadaan Listrik dan Gas	0,62	0,63	0,43
Pengadaan Air	0,55	0,64	0,53
Konstruksi	6,41	5,79	6,03
Perdagangan	22,08	21,99	20,06
Transportasi dan Pergudangan	5,07	4,61	5,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,16	7,66	7,60
Informasi dan Komunikasi	0,90	0,87	0,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,07	1,19
Real Estat	0,35	0,25	0,50
Jasa Perusahaan	2,12	2,51	3,15
Administrasi Pemerintahan	6,72	7,20	6,41
Jasa Pendidikan	5,76	5,80	5,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,42	2,42
Jasa Lainnya	4,88	4,03	4,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Sakernas Agustus

Status/kedudukan pekerjaan adalah kedudukan pekerja dalam pekerjaan utamanya. Terdapat empat kriteria dari status pekerjaan, yaitu pengusaha (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu pekerja tetap), buruh/karyawan, pekerja bebas (pertanian dan non pertanian), serta pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Pekerja keluarga sering diasosiasikan sebagai pekerja pada sektor informal dengan ciri-ciri jumlah jam kerja dan produktivitasnya yang rendah. Sementara itu pekerja dengan status buruh/karyawan dan berusaha dibantu dengan buruh tetap diasosiasikan sebagai pekerja sektor formal.

Tabel 5.16 Persentase Penduduk 15+ Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022
(1)	(3)	(4)	(5)
Berusaha Sendiri	21,70%	20,74%	23,94%
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	11,08%	11,31%	8,42%
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	3,44%	3,70%	3,35%
Buruh/Karyawan	49,41%	49,81%	52,39%
Pekerja Bebas di Pertanian	1,12%	1,12%	1,20%
Pekerja Bebas non Pertanian	3,06%	3,34%	2,71%
Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	10,19%	9,98%	8,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Sakernas Agustus

Pada tahun 2022, lebih dari separuh penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan (52,39 persen). Disusul oleh penduduk usia kerja yang berusaha sendiri sebanyak 23,94 persen. Sepanjang periode tahun 2020-2022, tidak terdapat perubahan pola persebaran yang signifikan pada semua status pekerjaan utama.

Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir. Jumlah jam kerja 35 jam seminggu dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengelompokkan seorang pekerja apakah dia termasuk pekerja penuh atau pekerja tidak penuh. Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Sedangkan pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Tabel 5.17 Persentase Status Penduduk 15+ Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seminggu di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2021

Status	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekerja Paruh Waktu	21,71%	22,82%	21,50%
Pekerja Setengah Penganggur	7,14%	5,97%	4,81%
Pekerja Penuh	71,15%	71,21%	73,69%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Sakernas Agustus

Sampai dengan tahun 2022, masih terdapat sekitar 26,31 persen penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Timur yang jumlah jam kerja seminggunya masih di bawah 35 jam, yang terbagi menjadi 21,50 persen pekerja paruh waktu dan 4,81 persen setengah pengangguran. Angka ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021, yang pada tahun tersebut terdapat sekitar 28,79 persen penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Timur yang jumlah jam kerja seminggunya masih di bawah 35 jam.

Batasan jam kerja 35 jam/minggu digunakan sebagai batas jam kerja normal. Semakin banyak jam kerja dari seorang pekerja selama seminggu, dapat mencerminkan tingginya produktivitas. Namun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan jam kerja juga dapat diartikan bahwa terdapat kemungkinan seorang pekerja menjadi kurang efisien dalam bekerja, atau malah pekerja tersebut harus bekerja hingga lewat waktu akibat tuntutan tempat ia bekerja. Oleh karena itu, selain penggunaan jam kerja sebagai ukuran

produktivitas, perlu juga diperhatikan aspek/variabel lainnya, seperti jumlah/nilai *output* yang dihasilkan oleh seorang pekerja dalam menggunakan jam kerjanya.

Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka dilakukan pendekatan melalui pengeluaran rumah tangga.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan (*demand*) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan untuk bukan makanan.

Pada negara-negara yang sedang berkembang, pengeluaran untuk keperluan makan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Di negara-negara maju, pengeluaran bukan makanan merupakan bagian yang terbesar dari pengeluaran rumah tangga karena pengeluaran makanan bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan yang utama. Pengeluaran primer sudah bergeser kepada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberi gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Terjadinya perubahan pengeluaran atau pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dapat menunjukkan ada atau tidaknya peningkatan taraf kehidupan rumah tangga. Semakin besar konsumsi/pengeluaran rumah tangga terutama porsi pengeluaran untuk bukan makanan, maka cenderung bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik.

Tabel 5.18 Persentase Pengeluaran Penduduk per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2021

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	46,26	44,78	45,06	42,85
Bukan Makanan	53,74	55,22	54,94	57,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Secara proporsi, terjadi peningkatan pengeluaran per kapita di Provinsi Kalimantan Timur untuk pengeluaran bukan makanan terhadap pengeluaran untuk makanan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, naik dari 54,94 persen menjadi 57,15 persen. Pola pengeluaran masyarakat yang semakin didominasi oleh pengeluaran bukan makanan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kalimantan Timur.

Tabel 5.19 Persentase Pengeluaran Penduduk per Kapita Kelompok Bukan Makanan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2018-2021

Wilayah Tempat Tinggal	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)
Perkotaan	57,08	57,40	57,22	59,39
Perdesaan	48,90	49,11	48,43	50,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, penduduk Kalimantan Timur di wilayah perkotaan cenderung menyisihkan pengeluarannya untuk komoditas bukan makanan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan. Sebaliknya, penduduk di perdesaan menyisihkan lebih hampir separuh dari total pengeluarannya untuk bahan makanan. Secara tersirat, dapat

disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antara penduduk perkotaan dengan penduduk perdesaan di provinsi Kalimantan Timur.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang umumnya selalu dihadapi oleh sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan penyakit sosial di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sesuai dengan standar tertentu sehingga dikategorikan miskin.

Tabel 5.20 Garis Kemiskinan Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2022 (Rupiah)

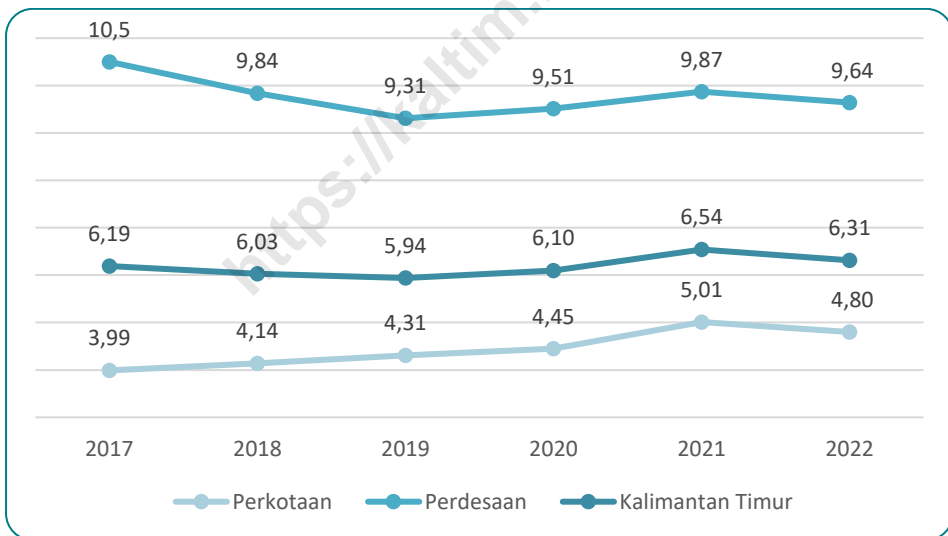
Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kalimantan Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	485 887	452 999	473 710
2016	519 653	495 975	511 205
2017	555 880	532 719	548 094
2018	576 265	570 012	574 704
2019	614 221	597 451	609 155
2020	665 970	652 620	662 302
2021	695 824	673 636	689 035
2022	732 195	718 550	728 208

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Susenas Maret

Tingginya tingkat kemiskinan secara umum merupakan indikasi lemahnya perekonomian dari suatu wilayah. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan ekonomi di antaranya akan tercermin dari keberhasilan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sehingga standar yang digunakan untuk menentukan penduduk sebagai penduduk miskin atau bukan miskin adalah garis kemiskinan (tabel 5.20). Bila diperhatikan, garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana garis kemiskinan untuk wilayah perdesaan lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini terbilang wajar, mengingat biaya hidup di daerah perkotaan juga cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Gambar 5.9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Susenas Maret

Bila dilihat dari daerah tempat tinggalnya, persentase penduduk miskin Kalimantan Timur di daerah perdesaan selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan timur selalu berada di kisaran 6 persen. Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 merupakan yang paling tinggi sepanjang periode 2017-2021. Adapun di tahun 2022, persentase penduduk

miskin di Kalimantan Timur mengalami penurunan dibanding tahun 2021, namun masih lebih tinggi dibanding tahun 2019. Terlihat juga bahwa penduduk miskin di daerah perdesaan cenderung jauh lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Peningkatan pendapatan yang tinggi akan sedikit manfaatnya bagi masyarakat banyak apabila tingkat pemerataannya rendah, bahkan memungkinkan timbulnya eksese negatif berupa kerawanan sosial jika kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jika Koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan pendapatan sempurna, sedangkan jika Koefisien Gini bernilai 1 berarti ketimpangan pendapatan sempurna. Selain koefisien gini, terdapat juga Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Tabel 5.21 Koefisien Gini, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koefisien Gini	0,338	0,333	0,339	0,327
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,910	1,015	1,223	0,989
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,210	0,240	0,337	0,226

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Susenas Maret

Pada tahun 2022, angka Koefisien Gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,327. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar 0,339, yang bahkan masih lebih rendah dibanding tahun 2022 (0,333) dan tahun 2019 (0,338). Artinya, kondisi ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 cenderung membaik jika dibandingkan dengan sepanjang periode tiga tahun ke belakang. Koefisien Gini yang berada di antara 0,3-0,5 termasuk ke dalam kategori sedang.

Pada indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), keduanya mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Meningkatnya indeks P1 tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tersebut (2019-2022) semakin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan meningkatnya indeks P2 menandakan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang semakin bertambah.

Perumahan

Hak warga negara untuk bertempat tinggal diatur dalam UUD 1945 maupun undang-undang. UUD 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat bahwa perumahan merupakan hak setiap orang dan merupakan kebutuhan dasar manusia, serta mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Lebih lanjut, dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dengan demikian, hak bertempat tinggal bagi warga negara sesungguhnya telah dinaungi oleh hukum di Indonesia.

Salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap derajat kesehatan manusia adalah keadaan lingkungan. Hal ini dikarenakan manusia dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan sehat akan melahirkan manusia sehat. Begitu juga orang-orang yang sehat akan menghasilkan lingkungan yang sehat pula.

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka fungsi rumah mengalami perkembangan, tidak saja untuk tempat berlindung dari pengaruh kondisi alam, tetapi juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis atau kejiwaan, gaya hidup, status sosial, dan sebagainya. Dilihat dari sudut kejiwaan, rumah merupakan basis terbentuknya kepribadian dan watak manusia. Dalam lingkungan rumah suatu individu mengenal norma-norma tertentu dan adat kebiasaan yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat di sekitarnya. Begitu besar peran dan arti sebuah rumah, membuat semua orang selalu berusaha meningkatkan kualitas rumah dan fasilitas rumahnya agar dapat mendukung segala aktivitasnya.

Secara umum kualitas fisik rumah tempat tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding. Selain kualitas fisik rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang tersedia di rumah tersebut. Berbagai fasilitas dan kondisi fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya adalah sumber air minum, jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah terdekat, fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya serta mendukung dalam terwujudnya kesehatan anggota rumah tangga.

Tabel 5.22 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021

Fasilitas Perumahan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(3)
Jamban Sendiri	92,49	93,33	93,53
Jamban dengan Septik Tank (SPAL)	74,68	88,80	88,78
Penerangan Listrik PLN/non PLN	99,46	99,52	99,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah sangat menentukan kenyamanan suatu rumah tinggal serta juga menentukan kualitas rumah tinggal tersebut. Fasilitas penting dalam suatu rumah tinggal adalah keberadaan jamban sendiri, jamban dengan tangki septik dan penerangan listrik. Ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut akan membantu meningkatkan kenyamanan dan kesehatan suatu rumah tinggal.

Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 93,53 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah memiliki jamban sendiri sebagai sarana pembuangan akhir tinja, naik jika dibandingkan dengan dua tahun ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kalimantan Timur terkait kondisi kualitas perumahan semakin baik. Di sisi lain pada periode yang sama, rumah tangga yang memiliki jamban dengan septik tank (SPAL) mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan, menjadi sebanyak 88,78 persen dari total keseluruhan rumah tangga yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan Penerangan juga menjadi fasilitas penting dalam suatu rumah. Salah satu faktor penentu untuk dapat memperoleh akses fasilitas penerangan, seperti listrik, adalah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas penerangan rumah tangga juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya.

Pada tahun 2021, persentase rumah tangga di Kalimantan Timur yang menggunakan penerangan listrik, baik yang berasal dari listrik PLN maupun listrik non PLN sebanyak 99,82 persen. Angka ini naik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 (99,52 persen). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur, fasilitas penerangan sudah baik, hampir 100 persen rumah tangganya sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.

Selain jamban dan penerangan, keberadaan air juga sangat penting dalam kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Di antara penggunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk air minum. Ketersediaan air bersih dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Selain kuantitas, kualitas dari air juga perlu diperhatikan dalam menjamin tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat.

Jenis sumber air minum merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketersediaan air, baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi, di suatu wilayah.

Tabel 5.23 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2020

Sumber Air Minum	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Air Ledeng	18,66%	15,55%	15,02%	11,90%
Air Kemasan/Isi Ulang	67,59%	73,20%	73,39%	75,17%
Sumur bor/pompa dan sumur lainnya	7,89%	6,77%	6,57%	6,61%
Mata air, sungai, air hujan, dan lainnya	5,87%	4,48%	5,02%	6,32%

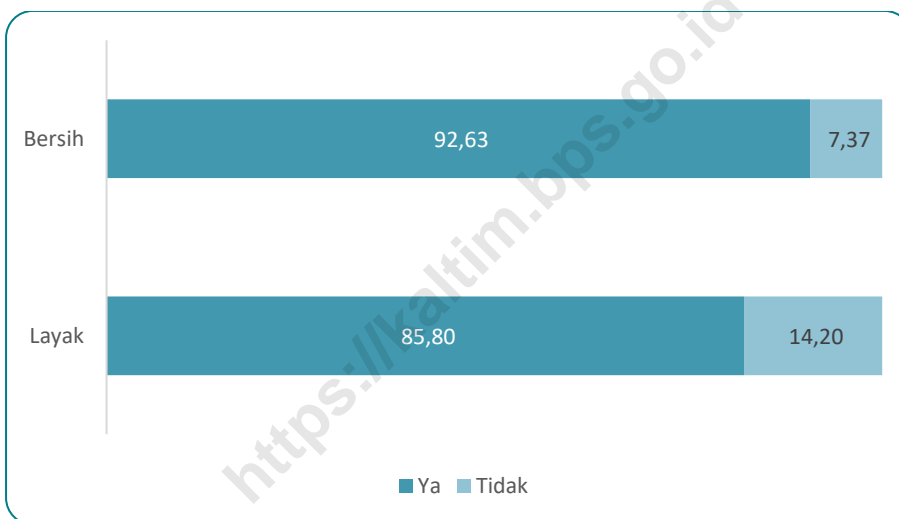
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2021, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan air kemasan/isi ulang sebagai sumber air minum utamanya, sebanyak 75,17 persen dari total keseluruhan rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur. Angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2018 (67,59 persen), 2019 (73,20 persen), dan 2020 (75,17 persen). Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan air ledeng dengan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat cenderung lebih memilih untuk menggunakan air kemasan/isi ulang karena dianggap lebih praktis dan tidak perlu dimasak lagi sehingga lebih hemat waktu.

Namun di sisi lain, tidak semua orang beruntung untuk memiliki akses sumber air minum yang bersih. Hingga tahun 2021, masih ada sebanyak 7,37 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang masih belum memiliki akses sumber air minum yang bersih. Bahkan Jika dilihat dari sisi kelayakan sumber air, masih ada 14,20 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang masih belum memiliki sumber air minum yang layak.

Suatu rumah tangga dikatakan memiliki sumber air yang bersih apabila sumber air minum utama keluarga tersebut bersumber dari air kemasan/isi ulang, air isi ulang, leding, sumur, atau mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter. Sedangkan suatu rumah tangga dikatakan memiliki sumber air yang layak apabila sumber air minumannya berasal dari leding, air hujan, sumur, atau sumber air minum kemasan/isi ulang, dan menggunakan air yang bersumber dari sumur atau mata air terlindung untuk kegiatan lainnya.

Gambar 5.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2021

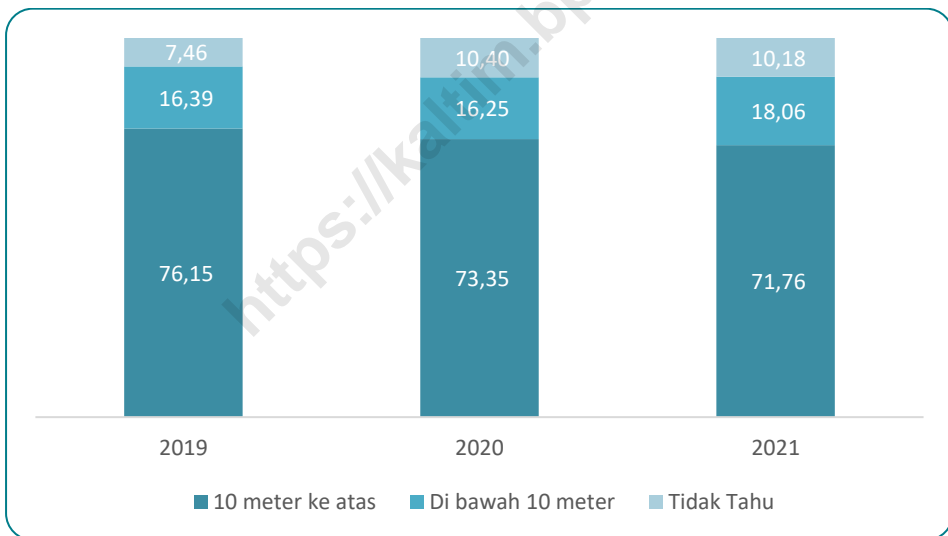


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pertambahan penduduk yang tidak sebanding dengan perluasan area pemukiman, menimbulkan masalah pembuangan limbah/kotoran. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan limbah rumah tangga merupakan masalah pokok yang sedini mungkin harus diatasi. Karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber dari limbah/kotoran dapat melalui beberapa cara atau jalan antara lain yaitu melalui air, tangan, lalat, dan tanah. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan limbah/kotoran disertai dengan cepatnya pertambahan jumlah penduduk, jelas akan mempercepat penyebaran penyakit.

Tempat pembuangan limbah terdekat sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat pembuangan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar, misalnya seperti tempat pembuangan berupa lubang tanah atau tanah terbuka dapat mencemarkan sumber air di dekatnya dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia juga tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Gambar 5.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung dan Mata Air Tak Terlindung menurut Kabupaten/Kota dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Jarak sumber air minum, seperti sumur dan mata air dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat patut menjadi perhatian. Jarak sumber air minum, terutama yang berasal dari sumur dan mata air, dengan tempat pembuangan limbah terdekat merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesehatan air minum rumah tangga. Semakin pendek jarak tersebut, maka kemungkinan sumber air minum tersebut semakin mudah tercemar oleh zat-zat ataupun unsur aman dan ideal untuk tempat

pengambilan air minum ke tempat penampungan kotoran adalah 10 meter lebih. Karena dengan jarak ini rembesan dari air limbah tidak bisa meresap sampai ke sumur atau mata air.

Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 71,76 persen rumah tangga yang sumber air minum utamanya (berupa sumur, mata air, dan sumber air terbuka lainnya) memiliki jarak dengan tempat pembuangan limbah/tinja sejauh lebih dari 10 meter. Angka ini menurun dibanding tahun 2019 (76,15 persen) dan tahun 2020 (73,35 persen). Hingga tahun 2021, masih ada rumah tangga yang sumber air minumnya masih berdekatan dengan tempat pembuangan limbah, sebanyak 18,06 persen. Persentasenya pun meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Adanya peningkatan angka ini menunjukkan turunnya kesadaran masyarakat akan mengenai pentingnya kesehatan pada rumah tinggal, termasuk berbahayanya limbah rumah tangga. Sisanya sekitar 10 persen tidak yakin dengan jarak antara sumber air minumnya dengan tempat pembuangan limbah, sehingga memilih untuk menjawab “tidak tahu”.

Tabel 5.24 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan di Provinsi Kalimantan Timur (Persen), 2019-2021

Sumber Air Minum	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Tanah	0,50	0,66	0,63
Luas Lantai per Kapita < 10 m ²	21,82	20,17	15,12
Atap Selain Genteng, Beton, dan Seng	9,97	6,22	5,92
Dinding Selain Tembok, Kayu, dan Bahan Sejenis	0,61	0,27	0,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Rumah dikatakan layak sebagai tempat tinggal apabila rumah tersebut mempunyai atap, dinding dan lantai. Dari ketiga unsur tersebut juga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain itu, kualitas fisik rumah tinggal yang ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang

digunakan, secara nyata dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan.

Ditinjau dari segi kesehatan jenis lantai yang digunakan rumah tangga juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Rumah yang memenuhi syarat kesehatan harus memiliki konstruksi lantai yang rapat air dan selalu kering, agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, juga dapat menghindari kelembaban air tanah naik ke lantai. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Lantai tanah kurang baik karena dapat berdebu pada saat musim kemarau dan akan basah pada musim hujan. Lantai yang basah dan berdebu merupakan tempat timbulnya kuman penyakit dan menjadi media penularan berbagai jenis penyakit. Hingga tahun 2021, masih ada sekitar 0,63 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang rumahnya masih berlantai tanah.

Selain menggambarkan tingkat kesehatan, luas lantai juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga. Menurut *American Public Health Association* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 m². Pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat sebanyak 15,12 persen rumah tangga yang menghuni rumah yang luas lantai per kapita kurang dari 10 m².

Atap dan dinding juga menjadi Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan sebagai tempat tinggal. Persyaratan rumah sehat antara lain memiliki konstruksi bangunan cukup kuat. Salah satu ciri konstruksi bangunan yang cukup kuat adalah memiliki konstruksi atap yang cukup rapat dan tidak tiris. Jenis atap yang kurang baik untuk kesehatan antara lain ijuk atau rumbia dan lain sejenisnya.

Jenis dinding rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Persyaratan rumah sehat salah satunya memiliki konstruksi dinding luar yang kuat. Jenis dinding yang baik adalah tembok atau kayu. Dinding rumah sebaiknya kering agar ruangan tidak menjadi lembap, karena dinding yang lembap menimbulkan risiko timbulnya penyakit. Sedangkan dinding bambu dan lain sejenisnya tidak baik untuk kesehatan.

Persentase rumah dengan atap selain genteng, beton, dan seng dan lainnya di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, dari 6,22 persen di tahun 2020 menjadi 5,92 persen di tahun 2021. Berdasarkan dindingnya, persentase rumah dengan dinding selain tembok, kayu, dan bahan sejenis di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 0,20 persen, turun dari 0,27 persen di tahun sebelumnya (2020).

Secara garis besar, dengan adanya tren penurunan pada komponen-komponen, tersebut maka dapat dikatakan bahwa kualitas perumahan di Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik.

DAFTAR PUSTAKA



Daftar Pustaka

- Alpian Y., dkk. 2019. Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. Jurnal Buana Pengabdian. E-Journal Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol.1, No.1, Februari 2019, hal.66-72.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2018. Samarinda: CV Mahendra.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2019/2020. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2019. Samarinda: CV Mahendra.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2019. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2019. Samarinda: CV Sekar Mulya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Timur Agustus 2020. Samarinda: BPS Provinsi Kaltim.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Berita Resmi Statistik Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Maret 2020. Samarinda: BPS Provinsi Kaltim.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur 2019. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2015-2019. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2020. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2021. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Timur Agustus 2021. Samarinda: BPS Provinsi Kaltim.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2021. Berita Resmi Statistik Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Maret 2021. Samarinda: BPS Provinsi Kaltim.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2021. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur 2020. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2021. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2021. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2022. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Timur Agustus 2022. Samarinda: BPS Provinsi Kaltim.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2022. Berita Resmi Statistik Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Maret 2022. Samarinda: BPS Provinsi Kaltim.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2022. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur 2022. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2022. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021. Samarinda: CV Suvi Sejahtera.
- Maryati, Sri. 2015. Dinamika Pengangguran Terdidik, Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia. Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang: *Journal of Economic Education* Vol.3 No.2 (124-136).
- Mulyasa E., 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Widodo. 2015. Manajemen Pengembang Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	IPM Laki-laki	IPM Perempuan	IPG
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	78,33	55,76	71,19
Kutai Barat	77,31	65,16	84,28
Kutai Kartanegara	79,47	62,88	79,12
Kutai Timur	79,21	60,52	76,40
Berau	79,72	69,96	87,76
Penajam Paser Utara	76,63	66,34	86,57
Mahakam Ulu	74,33	60,69	81,65
Kota Balikpapan	85,75	77,03	89,83
Kota Samarinda	85,07	75,94	89,27
Kota Bontang	85,33	74,34	87,12
KALIMANTAN TIMUR	81,86	70,36	85,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 2 Komponen Penyusun IPM Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah per tahun)
(1)	(2)	(3)	(2)	(2)
Paser	70,86	13,18	9,15	17 502
Kutai Barat	71,13	13,09	9,34	15 225
Kutai Kartanegara	70,67	13,54	9,58	18 079
Kutai Timur	71,50	12,77	9,89	17 595
Berau	70,34	13,02	9,90	19 231
Penajam Paser Utara	70,05	12,43	8,80	17 445
Mahakam Ulu	70,34	13,02	8,92	12 385
Kota Balikpapan	72,86	14,22	11,36	23 073
Kota Samarinda	72,62	15,00	10,90	21 177
Kota Bontang	72,63	13,24	11,11	25 917
KALIMANTAN TIMUR	72,79	13,80	10,23	18 560

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 3 Komponen Penyusun IPM Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah per tahun)
(1)	(2)	(3)	(2)	(2)
Paser	74,84	13,47	8,36	2 965
Kutai Barat	74,95	13,02	8,14	5 930
Kutai Kartanegara	74,50	13,66	8,64	4 625
Kutai Timur	75,32	13,00	8,78	3 947
Berau	74,13	14,22	9,13	7 574
Penajam Paser Utara	74,05	12,63	7,83	7 218
Mahakam Ulu	74,14	12,59	8,11	4 449
Kota Balikpapan	76,55	14,31	10,69	10 953
Kota Samarinda	76,23	15,12	9,99	10 070
Kota Bontang	76,27	13,17	10,54	9 712
KALIMANTAN TIMUR	76,51	13,88	9,42	7 161

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Kabupaten/Kota	IDG
(1)	(2)
Paser	65,67
Kutai Barat	65,34
Kutai Kartanegara	62,76
Kutai Timur	53,78
Berau	56,48
Penajam Paser Utara	49,85
Mahakam Ulu	80,43
Kota Balikpapan	68,62
Kota Samarinda	67,54
Kota Bontang	45,67
KALIMANTAN TIMUR	66,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

**Lampiran 5 Komponen Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021**

Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (persen)	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen)
(1)	(2)	(3)	(2)
Paser	20,00	44,39	23,71
Kutai Barat	16,00	49,94	26,62
Kutai Kartanegara	15,56	43,72	24,51
Kutai Timur	12,50	49,74	18,47
Berau	16,67	41,54	17,57
Penajam Paser Utara	4,00	58,81	25,82
Mahakam Ulu	40,00	45,80	28,38
Kota Balikpapan	20,00	48,91	26,41
Kota Samarinda	15,56	41,27	31,16
Kota Bontang	8,00	42,74	17,15
KALIMANTAN TIMUR	20,37	45,37	24,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 6 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2021

Lapangan Usaha	Share NTB
(1)	(2)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,48
B. Pertambangan dan Penggalian	45,05
C. Industri Pengolahan	17,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05
F. Konstruksi	8,95
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,97
H. Transportasi dan Pergudangan	3,34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96
J. Informasi dan Komunikasi	1,46
K. Jasa Keuangan	1,62
L. Real Estate	0,84
M,N. Jasa Perusahaan	0,20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,90
P. Jasa Pendidikan	1,78
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,65
Produk Domestik Regional Bruto	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. Kemakmuran No.04, Samarinda 75117
Telp.: 0541-732793 E-mail: bps6400@bps.go.id
Homepage: <https://kaltim.bps.go.id>

ISSN 1907-2104



9 771907 210403 >